



**LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023**



**PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG**

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang atas pencapaian *output/ sub output* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam rangka mewujudkan *good governance*. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh staf pegawai Pengadilan Militer I-04 Palembang yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Amin

Palembang, 12 Februari 2024
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang,

Fredy Ferdian Isnartanto
Letnan Kolonel Chk

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2020–2024.

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG YANG AGUNG”.

Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Motto Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah : **“Bersamo Kito Pacak”.**

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah :

- Pertama** : Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; dan
Kedua : Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.

Dari tujuan tersebut maka sasaran Pertama yaitu Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Kedua adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; dan Ketiga adalah Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 indikator kinerja dan 6 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tiga sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tercapai dengan capaian kinerja sebesar **101,02%**. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
No	Sasaran Strategis	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	103,07%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100%
Jumlah Persentase Capaian Kinerja		101,02%

Secara keseluruhan target kinerja tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditentukan baik dari Sasaran Strategis I , II , dan III. Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2023 yaitu **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel** adalah Sebesar **103,07%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis I pada tahun 2023 dapat dilihat dan dirincikan dalam tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	96%	100%	104,2%
b.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	75%	80,4%	107,2%
c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%	100%	100,4%
d.	Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	91%	92,5%	100,5%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				103,07%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2023 yaitu **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara** adalah sebesar **100%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis II pada tahun 2023 dapat dilihat dan dirincikan dalam tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS II				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				100%

Dan tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2023 yaitu **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan** adalah sebesar **100%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis III pada tahun 2023 dapat dilihat dan dirincikan dalam tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				100%

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksklusif.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	2
1. Kedudukan.....	3
2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Kegiatan	3
1. Sarana dan Prasarana	3
2. Tenaga Personel Pengadilan Militer I-04 Palembang	8
3. Tugas Pokok.....	12
C. Struktur Organisasi	13
1. Susunan Organisasi	13
2. Struktur Organisasi	16
D. Isu Strategis	17
E. Sistematika Penyajian.....	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	20
1. Visi, Misi dan Motto	20
2. Tujuan	21
3. Sasaran Strategis	22
4. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	28
5. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	32
B. Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023.....	33
C. Penetapan Kinerja Tahun 2023	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Organisasi	35
1. Pengukuran Capaian Kinerja	30
2. Analisa Akuntabilitas Kinerja	37
1. Sasaran: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel	37
1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat waktu	37
2. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	44

3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	50
4. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan	56
2. Sasaran: Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara.....	64
3. Sasaran : Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.....	70
B. Realisasi Anggaran.....	76
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Peta Wilayah Hukum
3. Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2023
4. Daftar Pegawai yang Mengikuti Diklat tahun 2023
5. Reviu Indikator Kinerja Utama
6. Reviu Matrik Rencana Strategis 2020-2024
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan 2024
8. SK Tim Penyusunan LKJIP 2023
9. Realisasi Anggaran DIPA (01) BUA MARI Tahun 2023
10. Realisasi Anggaran DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MARI Tahun 2023
11. Undangan, Notulen Rapat, Dokumentasi dan Daftar Hadir Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2023
12. Pernyataan telah di Reviu dan Checklist Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan negara, Pengadilan Militer I-04 Palembang dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Militer I-04 Palembang juga menggunakan dana APBN, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Militer I-04 Palembang mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

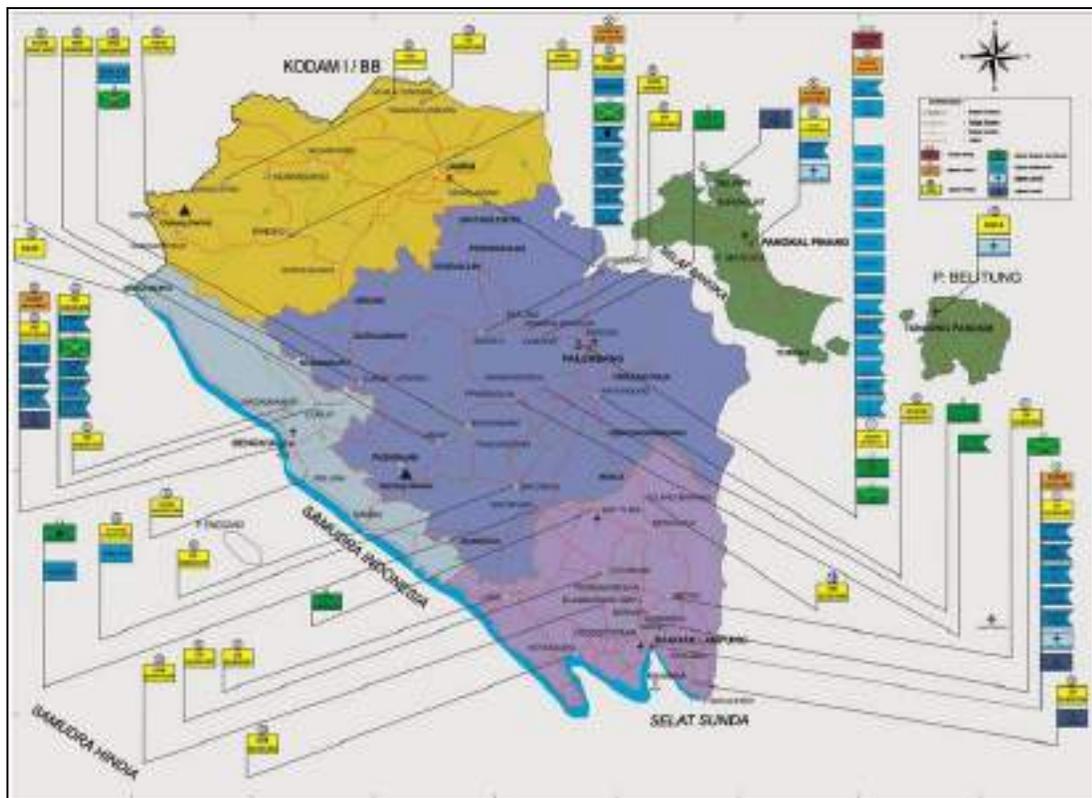
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai Lembaga Peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :



1. KEDUDUKAN

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Militer I-04 Palembang semenjak tanggal 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/ berada dibawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.



Wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Militer I-04 Palembang meliputi Provinsi Sumatera Selatan; Provinsi Jambi; Provinsi Bengkulu; Provinsi Lampung; dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. FAKTOR PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Sarana dan prasarana.

Gedung yang ditempati oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang beralamat di Jl. H. Bastari, Komplek Perumahan Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang, dan untuk mencapai ke gedung ini cukup mudah serta dapat ditempuh dari

beberapa arah karena lokasinya terletak di dalam kota Palembang. Berikut data fisik lahan dan bangunan Pengadilan Militer I-04 Palembang :

- a. Status lahan : Sertifikat Hak Pakai No. 36 atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Pengadilan Militer Palembang, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Palembang tanggal 12 April 2013.
- b. Luas tanah : 3.250 M² (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi).
- c. Luas bangunan : 1021 M² (seribu meter persegi) terdiri dari 2 (dua) lantai :
- d. Batas-batas :
 - 1) Utara (depan) : Jl. Utama Perumahan OPI.
 - 2) Timur (kanan) : Gedung BNN Provinsi Sumatera Selatan.
 - 3) Barat (kiri) : Gedung Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
 - 4) Selatan (belakang) : Tanah kosong milik Pemprov Sumsel.

Sarana dan Prasarana Pada Pengadilan Militer I-04 Palembang

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Ket
Lantai 1 (satu)			
1.	Ruang Sidang Utama	1	
2.	Meja PTSP	1	
3.	Ruang Sekretaris	1	
4.	Ruang Umum & Keuangan	1	
5.	Ruang Kepegawaian & Ortala	1	
6.	Ruang Perencanaan, IT, Pelaporan	1	
7.	Ruang Panel	1	
8.	Ruang Tunggu	1	
9.	Ruang Tahanan Pria	1	
10.	Ruang Tahanan Wanita	1	
11.	Toilet Pria	1	
12.	Toilet Wanita	1	
13.	Ruang Oditur	1	
14.	Ruang Penasihat Hukum	1	
15.	Ruang Perpustakaan	1	
16.	Ruang Klinik dan Laktasi	1	
17.	Ruang Bermain Anak	1	
Lantai 2 (dua)			
1.	Ruang Kepala	1	
2.	Ruang Waka	1	
3.	Ruang Ajudan	1	

4.	Ruang Pokkimmil	1	
5.	Ruang Sidang	1	
6.	Ruang Rapat	1	
7.	Ruang Kepaniteraan	1	
8.	Toilet Pria	1	
9.	Toilet Wanita	1	
10.	Ruang Arsip Perkara	1	
11.	Ruang IT/Server	1	
Sarana/Prasarana Fasilitas Kantor			
1.	Mesin ketik manual standard (14-16) inci	1	Baik
2.	Mesin ketik listrik standard (14-16) inci	1	Baik
3.	Mesin fotocopy folio	2	Baik
4.	Lemari Kayu	11	Baik
5.	Lemari Besi/Metal	13	Baik
6.	Mesin Diesel	1	Baik
7.	Movitex Board	1	Baik
8.	Meja Rapat	2	Baik
9.	Filing cabinet besi	8	Baik
10.	Brandkas	1	Baik
11.	Buffet	3	Baik
12.	Mobile File	2	Baik
13.	Alat penghancur kertas	3	Baik
14.	Mesin absensi	1	Baik
15.	Projector/infocus	1	Baik
16.	Papan Pengumuman	1	Baik
17.	Meja kerja kayu	61	Baik
18.	Kursi besi/metal	202	Baik
19.	Kursi kayu	13	Baik
20.	Meja Resepsionis	1	Baik
21.	Sofa Bed	2	Baik

22.	Partisi	2	Baik
23.	Publik Astari (pembatas Antrian)	4	Baik
24.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
25.	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
26.	Lemari Es	1	Baik
27.	A.c. Split	35	Baik
28.	Kitchen Set	1	Baik
29.	Televisi	5	Baik
30.	Sound System	1	Baik
31.	Unit Power Supplay	11	Baik
32.	Stabilisator	2	Baik
33.	Tiang Bendera	4	Baik
34.	Dispenser	4	Baik
35.	Lambang Instansi	1	Baik
36.	Hendy Cam	1	Baik
37.	Camera Digital	1	Baik
38.	Faxsimile	1	Baik
39.	P.C. Unit	27	Baik
40.	Note Book	22	Baik
41.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Baik
42.	Scanner	3	Baik
43.	Server	2	Baik
44.	Router	1	Baik
45.	Cat 6 Cable	1	Rusak
46.	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Rusak
47.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1	Baik
48.	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	Baik
49.	Lisensi	1	Baik
50.	Tanah Bangunan Kantor	1	Baik

51.	Tanah Kosong	1	Baik
52.	CCTV	1	Baik
53.	Rak Server	2	Baik
54.	Gordyin/Kray	114	Baik
55.	Alat Pemotong Kertas	1	Baik
56.	Mesin Pelubang Kertas	1	Baik
57.	Tabung Pemadam Api	4	Baik
58.	Kursi Roda/Kursi Dorong	1	Baik
59.	Lemari Arsip	2	Baik
60.	ATR	1	Baik
61.	Meja Rapat	2	Baik
62.	Kasur/Spring Bed	2	Baik
63.	Laptop	4	Baik
64.	LCD Monitor	1	Baik
65.	Loudspeaker	4	Baik
66.	Microphone	7	Baik
67.	Audio Mixing Console	1	Baik
68.	Camera Conference	1	Baik
69.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4	Baik
70.	Bracket Standing Peralatan	1	Baik
71.	Printer	13	Baik
72.	Kursi	50	Baik
73.	AC. Spilt	4	Baik
74.	AC Standing	4	Baik
75.	Kursi Tamu	1	Baik
76.	Voice Recorder	1	Baik
77.	Monografi	2	Baik

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
A.	Jenis Kendaraan Roda 4					Kondisi
1.	<i>Toyota Kijang Innova E</i>	2008	Baik			50 %
2.	<i>Nissan Grand Livina</i>	2011	Baik			60 %
3	<i>Toyota Vios</i>	2023	Baik			100%
B.	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	<i>Honda Supra X 125 R</i>	2006	Baik			60 %
2.	<i>Honda Mega Pro CW</i>	2007	Baik			60 %
3.	<i>Honda Mega Pro STD</i>	2008	Baik			60 %
4.	<i>Honda Revo NF 100 TD</i>	2008	Baik			60 %
5.	<i>Honda Revo NF 100 TD</i>	2008	Baik			60 %
6.	<i>Honda Revo NF 100 TD</i>	2008	Baik			60 %
7.	<i>Honda Revo NF 100 TD</i>	2008	Baik			60 %
8.	<i>Honda GL MAX</i>	2005		Rusak Ringan		45 %
9.	<i>Honda Tiger CW GL 200 R</i>	2009	Baik			75 %
10.	<i>Honda Mega Pro STD</i>	2009	Baik			65 %

Sumber : Laporan Bulanan Program kerja Des 2023

b. Tenaga Personel Pengadilan Militer I-04 Palembang

Personel Pengadilan Militer I-04 Palembang terdiri dari Personel TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN), Personel TNI sebanyak 15 (lima belas) Orang, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 14 (empat belas) Orang dan PPNPN untuk Satpam, Pengemudi dan Pramubakti sebanyak 11 (sebelas) orang, jumlah seluruhnya adalah 40 (empat puluh) orang.

No	Nama	Pkt/Gol	Jab	Dik	Ket
I. Personel Militer Pengadilan Militer I-04 Palembang					
1.	Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.	Letkol Chk	Kepala	S2	-
2.	Syawaluddinsyah, S.H., M.H	Letkol Chk	Wakil Kepala	S2	-
3.	J.M.Siahaan, S.H.,M.Hum.	Letkol Chk	Hakim	S2	-
4.	Sudiyo, S.H., M.H.	Letkol Chk	Hakim	S2	-
5.	Endah Wulandari, S.H.,M.H.	Mayor Chk (K)	Hakim	S2	-
6.	Sugiarto, S.H.	Kapten Chk	Hakim	S1	-
7.	Zulkopli, S.H.,M.H.	Mayor Chk	Panitera	S2	-
8.	Supriyadi, S.H, M.H.,M.Kn.	Mayor Chk	Sekretaris	S2	-
9.	Tobri Antony, S.H.	Lettu Chk	Panitera Muda Hukum	S1	-
10.	Gunadi, S.H.	Lettu Chk	Panitera Muda Pidana	S1	-
11.	Sapriyanto, S.H	Peltu	Panitera Pengganti	S1	-
12.	Hari Wibowo, S.H	Serma	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara, Pada Panitera Muda Perkara	S1	-
13.	Rosita, S.H	Serma (K)	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara, Pada Panitera Muda Hukum	S1	-
14.	Sarjito	Serka	Klerek-Pengolah Data dan Informasi, Sub Bagian Umum dan Keuangan	SMA	-
15.	Daroni	Kopka	Klerek-Pengadministrasi Perkantoran, Sub Bagian Umum dan Keuangan	SMP	-

II. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang					
1.	Agustina Yanti, S.H.	Penata Tk.I	Kasubbag Umum dan Keuangan	S1	-
2.	Febriansyah, S.H.	Penata	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	S1	-
3.	Devi Wahyuni, S.H.M.H	Penata	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	S2	-
4.	Medi Darmawansyah, S.H.M.H	Penata Tk-I	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	S2	-
5.	Muhammad Nasir, S.H	Penata	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	S1	-
6.	Sorna Nauli Nasution, S.H.	Penata Muda TK-I	Pranata Keuangan APBN Mahir	S1	-
7.	Mona Anggreyni, S.I.P	Penata Muda TK-I	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	S1	-
8.	Yusyanto, S.H	Penata Muda Tk- I	Operator- Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Umum dan Keuangan	S1	-
9.	M. Maniar Marpaung	Penata Muda Tk-I	Klerek- Pengadministrasi Perkantoran, Subbag Umum & Keuangan	SMA	-
10.	Sulistyo	Penata Muda Tk-I	Klerek- Pengadministrasi Perkantoran, pada Panitera muda Pidana	SMA	-

11.	Alexander S. Sihotang, SE	Penata Muda	Klerek- Penelaah Teknis Kebijakan, Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	S1	-
12.	Srilanjari, A.Md	Pengatur	Klerek- Pengolah Data dan Informasi Sub bagian Umum dan Keuangan	D3	-
13.	Niko Wijaya, A.Md	Pengatur	Klerek- Pengolah Data dan Informasi Subbagian Kepegawaian dan Ortala	D3	-
14.	Berliana Cahyani, A.Md.A.B	Pengatur	Klerek- Pengelola Penanganan Perkara Pada Panitera muda Pidana	D3	-

III. PPNPN Pengadilan Militer I-04 Palembang					
1.	Joko Susanto	-	PPNPN Satpam	SMA	Diperbantukan di Staf Kepegawaian & Ortala
2.	Febriadi	-	PPNPN Pramubakti	SMA	Diperbantukan di Staf Perkara
3.	Joni Per, SH	-	PPNPN Pengemudi	S1	Diperbantukan di Staf Umum & Keuangan
4.	Angga Wijaya,SH	-	PPNPN Pramubakti	S1	Diperbantukan di Staf P.TI.P
5.	Sugeng Riadi, SE	-	PPNPN Satpam	S1	Diperbantukan di Staf P.TI.P
6.	Zainul Arifin, S.Kom	-	PPNPN Satpam	S1	-
7.	Desly Farghani, S.H	-	PPNPN Pramubakti	S1	Diperbantukan di Staf P.TI.P
8.	Andri Febriansyah, S.Pd	-	PPNPN Satpam	S1	-

9.	Muhammad Robi	-	PPNPN Satpam	SMA	-
10.	Eno Violita, SH	-	PPNPN Pramubakti	S1	Diperbantukan di Staf Umum & Keuangan
11.	Putra Bagus Hartawan	-	PPNPN Satpam	SMA	-

Sumber : Laporan Bulanan Program kerja Des 2023

c. TUGAS POKOK

Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja disuatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. FUNGSI

- Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) yakni memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang Terdakwanya adalah prajurit TNI berpangkat Prada sampai dengan Kapten (berdasarkan Perundang-undangan menjadi wewenangnya). Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.
- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan internal tentang teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku Hakim, perilaku Panitera dan Pegawai, pelaksanaan administrasi perkara, pelaksanaan dan administrasi umum.
- Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- Fungsi lainnya sesuai kewenangan dan undang-undang.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Militer di dasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

a. Susunan Organisasi

Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang disusun sebagai berikut :

a.1. Unsur Pimpinan

a.1.1. Kepala Pengadilan Militer

Sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Pengadilan Militer Tinggi dan Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara pertama yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.

a.1.2. Wakil Kepala Pengadilan Militer.

Melaksanakan tugas kepala apabila kepala berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh kepala kepadanya.

a.2. Unsur Kepaniteraan.

Panitera

membawahi antara lain :

a.2.1. Panitera Muda Pidana.

Bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana/ kejahatan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara Lalu lintas;
- c. Pelaksanaan registrasi perkara;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- g. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

a.2.2 Panitera Muda Hukum.

bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara dibidang Pidana Hukum. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

a.2.3. Panitera Pengganti

Tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai diminutasi.

a.3. Unsur Kesekretariatan.

Sekretaris

membawahi antara lain :

a.3.1. Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Bertugas membantu Bagian Perencanaan dan dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

a.3.2. Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Bertugas untuk melaksanakan urusan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.

a.3.3. Kasub Bagian Umum dan Keuangan.

Bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

- Fungsional Arsiparis.
- Fungsional Pustakawan.
- Fungsional Pranata Komputer.
- Fungsional Bendahara.

a.4.. Unsur Pelaksana.

Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil

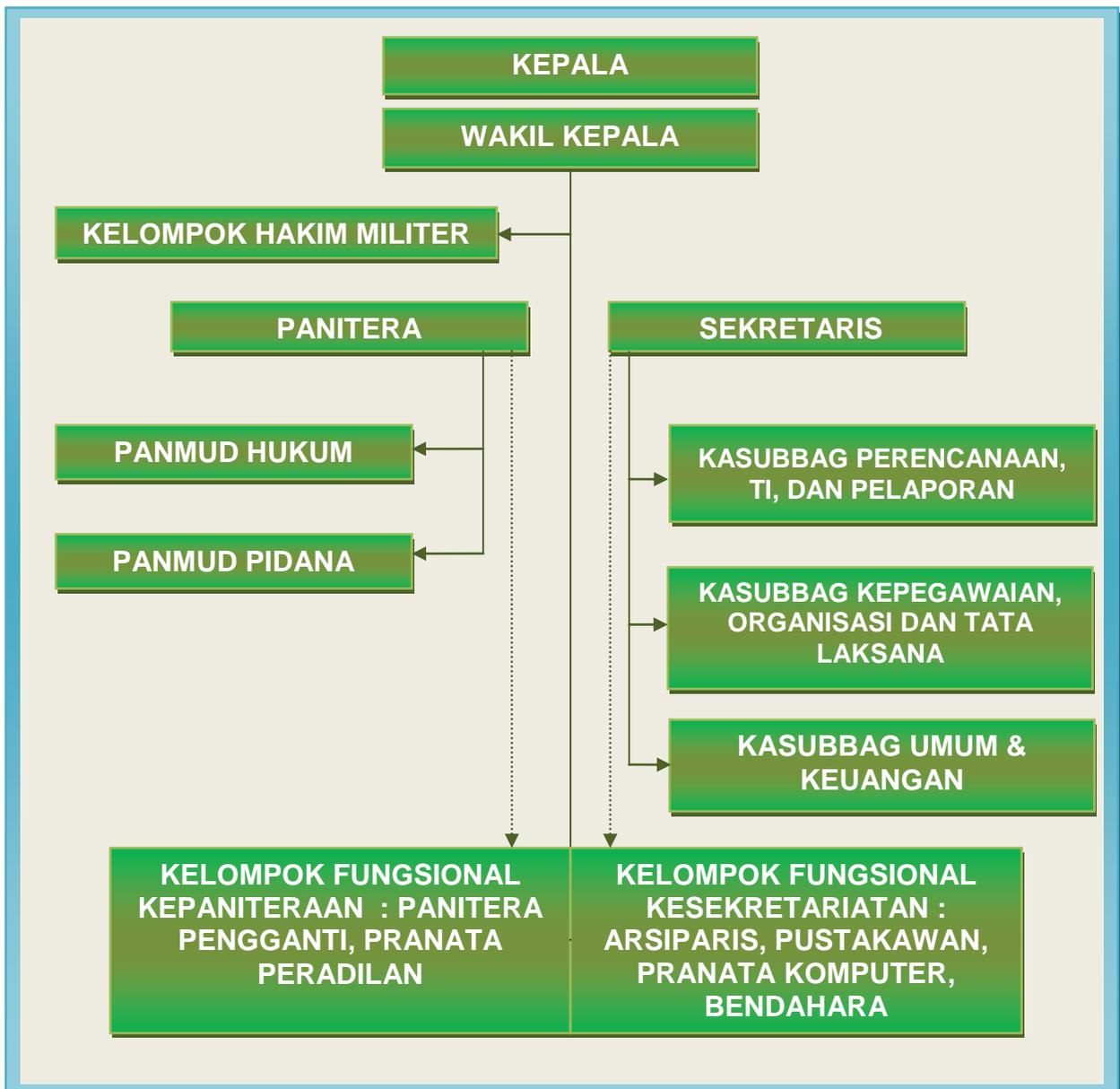
Bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan

pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani Putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepastakaan hukum yang diterima dari Makamah Agung kepada Hakim-hakim yang bersangkutan.

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terlampir.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG



Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

4. ISU STRATEGIS

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Militer I-04 Palembang menerima, memeriksa serta memutus perkara yang diberikan kepadanya yaitu prajurit TNI mulai dari pangkat Prajurit Dua sampai dengan Kapten.

Peran strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya, serta memberikan pelayanan dan penerangan / pembinaan hukum di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

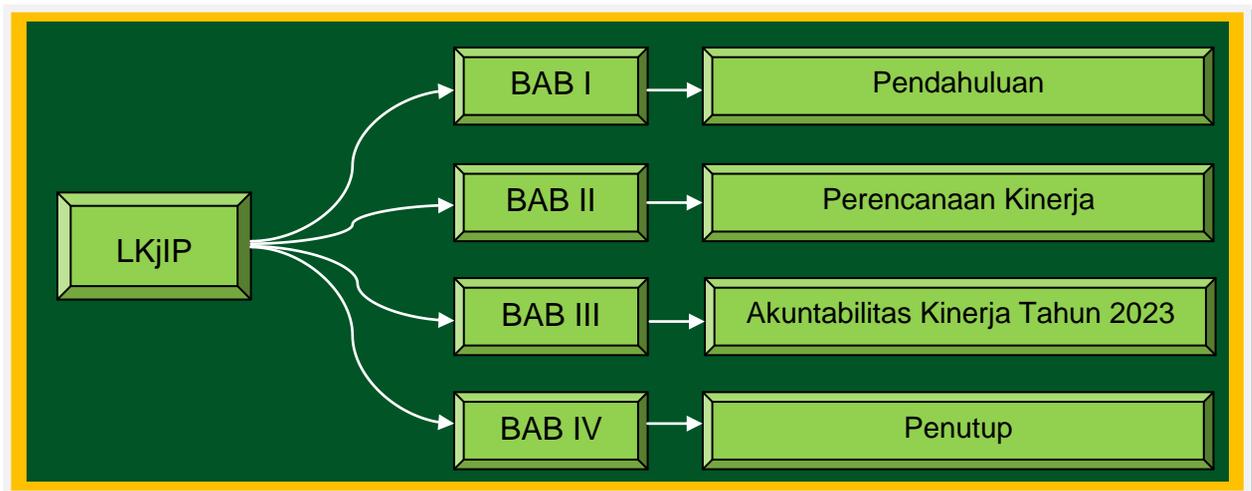
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer I-04 Palembang masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah :

- a. Produktifitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Termasuk Pengadilan Militer I-04 Palembang setiap tahunnya terus dipacu untuk lebih optimal dalam menyelesaikan perkara agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 5 (lima) bulan.
- b. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud.
- c. Putusan Pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat pertama tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum banding kasasi dan peninjauan kembali.

- d. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan.
- e. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang *excellent* (seperti: *independency, integrity, akuntability, responsibility, transparanty, impartial, dan equality*) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.
- f. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.
- g. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaruan.
- h. Pelaksanaan tugas pada wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang cukup luas mencakup seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung, sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan kinerja khususnya dalam hal menghadirkan para saksi yang berada di daerah yang jauh yang dapat membebankan biaya kepada para pencari keadilan.

5. **SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2023, sebagai berikut :



BAB I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020 – 2024, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang maupun *stakeholder eksternal*. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI, MISI DAN MOTTO

a. Visi

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah **“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG YANG AGUNG”**.

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut :

1) Pengertian secara kelembagaan : Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dan/atau ibu kota daerah setingkat provinsi, dan wilayah hukumnya meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2) Pengertian secara organisasional : Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan wilayah hukumnya yang terdiri dari Pengadilan Militer I-04 Palembang itu sendiri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Kepala dan Wakil Kepala Pengadilan), Kelompok Hakim Militer, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut. Pengadilan Militer I-04 Palembang berada dibawah Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut adalah :

- a) Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah Lembaga Peradilan di lingkungan badan Peradilan Militer tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.
- b) Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai berikut :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

c. Motto

Motto Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah : **“Bersamo Kito Pacak”**

2. TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 553/SEK/01/2014 tanggal 19

Desember 2014 dan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode tahun 2020 – 2024 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan uraian secara umum sebagai berikut :

- a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.
- c. Meningkatnya kepastian hukum

3. SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :
 - 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - 2) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
 - 3) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi; dan
 - 4) Indeks Persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan Peradilan
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah : persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah : persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Dalam Renstra Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan 3 (tiga) langkah penting yaitu :

a. Perencanaan Strategis

Faktor-faktor kunci keberhasilan yaitu strategi dirancang melalui analisis lingkungan internal dan eksternal, dengan mempertimbangkan nilai luhur sebagai berikut :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Berperilaku Adil;
- 3) Berperilaku Jujur;
- 4) Berperilaku Bijaksana;
- 5) Bertanggungjawab;
- 6) Menjunjung Tinggi Harga Diri;
- 7) Berintegritas Tinggi;
- 8) Berdisiplin Tinggi;
- 9) Berperilaku Rendah Hati;
- 10) Bersikap Mandiri; dan
- 11) Bersikap Profesional.

b. Penetapan Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi, Pengadilan Militer I-04 Palembang harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan yaitu :

- 1) Terwujudnya tertib administrasi Peradilan dalam melaksanakan tupoksi;
- 2) Terwujudnya aparatur Peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi;
- 3) Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien dan berkualitas; dan
- 4) Terwujudnya administrasi kesekretariatan yang dapat mendukung Tupoksi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

c. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan beberapa program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan, antara lain :

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis yang terdiri dari :

- a) Peningkatan jumlah penyelesaian perkara;
- b) Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara;
- c) Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan Hakim Terbang untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan; dan
- d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya merupakan program untuk mencapai sasaran strategis, yaitu tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana, pada TA. 2023 Pengadilan Militer I-04 Palembang telah memperoleh alokasi anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana, sehingga dengan demikian kegiatan pokok yang dilakukan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

VISI

“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG YANG AGUNG”

MISI

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

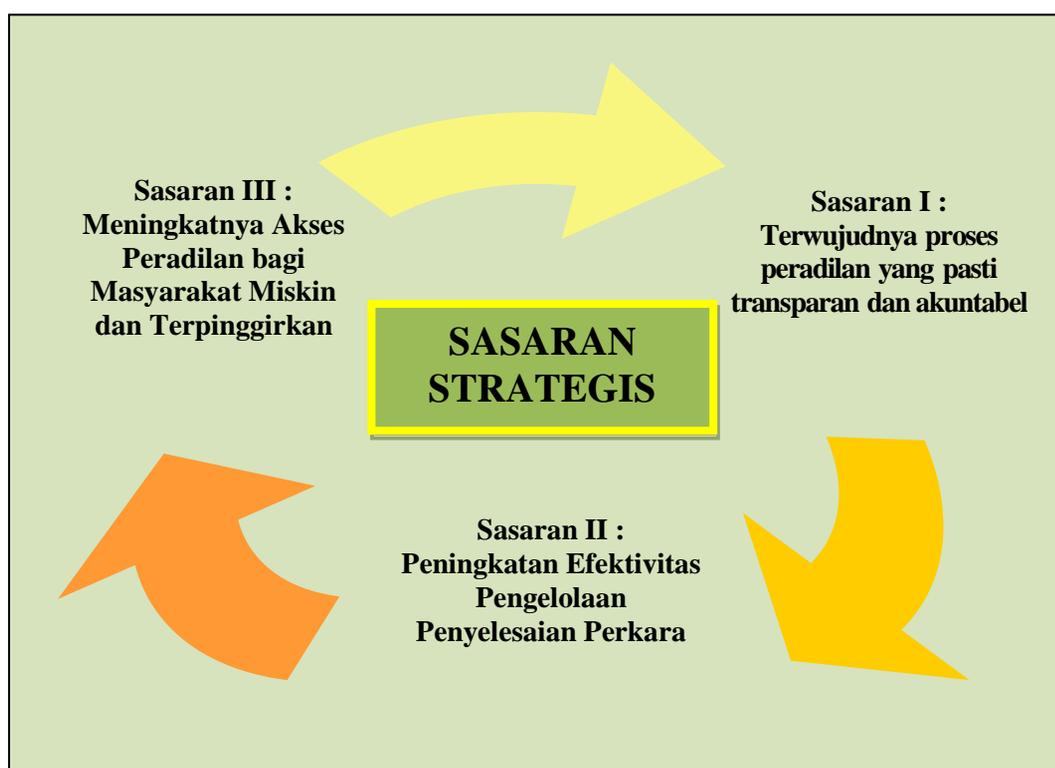
TUJUAN

- ✓ Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel.
- ✓ Keterjangkauan pelayanan badan peradilan.
- ✓ Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020 – 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1.2 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 1.3 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 1.4 Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan;

	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.
	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3.1 Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan



RENCANA STRATEGIS 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					Program
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1.Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara Pidana/Kejahatan dan Lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu	92%	94%	96%	98%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	89%	90%	93%	75%	75%	
			Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	89%	90%	91%	96%	93%	
			Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	89%	90%	91%	92%	92%	
	2.Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
			3.Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100%	100%	100%	100%	100%	

4. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Militer I-04 Palembang memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja menjadi kesepakatan bersama serta sebagai dasar bagi penetapan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Rencana Kinerja tahun 2023 secara singkat dapat dijelaskan dari tabel berikut ini :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Program
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	98%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%	
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	92%	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%	Perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan

KETERANGAN DAFTAR RENCANA KINERJA TAHUN 2023

1.a. *Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.*

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang ada. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- a. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.

- c. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- d. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- e. Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas.

Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target pada Tahun 2023 sebesar **98%** terhadap pencapaian penyelesaian perkara kejahatan dan pelanggaran putus tepat waktu. Target penyelesaian perkara juga memperhitungkan target penyelesaian perkara pidana/ kejahatan dan lalu lintas pada 5 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah perkara rata-rata yang masuk setiap tahunnya. Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas serta realisasi pada Tahun-tahun sebelumnya sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa perkara pelanggaran (vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dipastikan setelah sidang langsung putus karena proses penyelesaian melalui acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal, sesuai dengan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

1.b. *Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding* .

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding diambil dari perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.
- b. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target pada Tahun 2023 sebesar **75%** dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang tidak mengajukan upaya hukum banding mengalami kenaikan dan pada tahun 2022 Dilmil I-04 Palembang tidak mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Dari dasar tersebut Dilmil I-04 Palembang membuat keputusan untuk menurunkan target kinerja yang ada sebelumnya dari 96% menjadi 75%. Dengan penurunan target yang tidak mengajukan upaya hukum banding tersebut, diharapkan dapat terpenuhi di tahun 2023 ini.

1.c. *Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.*

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi diambil dari perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- a. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.
- b. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- c. Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target pada Tahun 2023 sebesar **96%** dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang tidak mengajukan upaya hukum berdasarkan data perkara pada laporan tahunan pada tahun anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022.

1.d. *Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.*

Persentase index persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan diambil dari evaluasi atas komponen hasil yaitu survei kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target index persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2023 sebesar **92%**, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Dengan demikian, target index persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2023 diharapkan dapat terpenuhi.

2. *Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Ke Para Pihak Tepat Waktu.*

Persentase salinan putusan yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu diambil dari perbandingan antara Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan. Berdasarkan formula perbandingan di atas maka penjelasannya sebagai berikut :

- a. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

- b. Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan Putusan yang dikirim ke Papera, Otmil, PM dan Ankum dan sesuai dengan ketentuan.
- c. Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- d. Papera : Perwira Penyerah Perkara.
- e. Otmil : Oditurat Militer.
- f. PM : Polisi Militer.
- g. Ankum : Atasan yang berhak menghukum.

Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2023 sebesar **100%**. Demikian pula dengan berkas dilimpahkan dari Oditurat Militer I-04 Palembang segera diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, untuk kemudian diputus dan diselesaikan (diminutasi) dengan memenuhi ketentuan acara yang berlaku. Dengan harapan, setiap perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat dikirim ke Oditurat Militer, Terdakwa dan juga pihak yang berkepentingan tepat waktu pada Tahun 2023 mencapai **100%**.

3. **Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan**

Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan diambil dari perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- a. Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- b. Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung Pengadilan dalam rangka percepatan perkara.
- c. Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (rensidkan).

Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Tahun 2023 sebesar **100%** dengan pertimbangan bahwa perkara kejahatan yang dirensidkan untuk sidang keliling (*zitting plats*) harus diputus semuanya. Namun perkara akan disidangkan untuk sidang keliling tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang keliling. Selain dari itu dipengaruhi alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sidang keliling. Dengan demikian,

target pada Tahun 2023 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi. Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Militer I-04 Palembang mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp 4.809.040.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan juta empat ribu rupiah) dari anggaran pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan anggaran pada DIPA Ditjen Badilmiltun Mahkamahh Agung RI sebesar Rp 175.700.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pengadilan Militer I-04 Palembang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang dan RPJM 2020 – 2024. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020 – 2024 Pengadilan Militer I-04 Palembang. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	Perbandingan antara Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah perkara yang diselesaikan.	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan Jumlah perkara yang diselesaikan.	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan Jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Nilai Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan yang berasal dari hasil survey Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	Panitera/ Sekretaris	Laporan Triwulan, dan Tahunan

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan

B. Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023

Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun reviu untuk Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2023 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	98%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Militer I-04 Palembang telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang dan RPJM 2020 – 2024. Adapun Penetapan Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	98%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (BUA MARI)	Rp4.809.040.000,00
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun MARI)	Rp175.700.000,00
Total	Rp4.984.740.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2023 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2023 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	98%	100%	104,2%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	80,4%	107,2%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%	100%	100,4%
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	92%	92,5%	100,5%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%

**PERBANDINGAN KEADAAN PERKARA
TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 2023**

TAHUN	SISA AWAL	PIDANA		JUMLAH PERKARA	PUTUS	SISA AKHIR TAHUN
		KEJAHATAN	PELANGGARAN			
2019	17	120	46	166	176	4
2020	4	110	27	137	137	4
2021	4	107	19	126	124	6
2022	6	113	31	150	148	2
2023	2	139	9	150	150	0

**GRAFIK PERBANDINGAN KEADAAN PERKARA
TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 2023**



2. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun Anggaran 2023, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Secara garis besar realisasi pada akhir tahun 2023 menunjukkan semua sasaran dicapai dengan baik bila dibandingkan dengan target Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan.



Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di pengadilan Militer I-04 Palembang diukur dengan menetapkan 4 Pencapaian target kinerja. Pencapaian target kinerja tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	98%	100%	102%
2	b) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	80,4%	107,2%
3	c) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%	100%	104,1%
4	d) Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	92%	92,5%	100,5%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1) **PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU**

a) **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah Perbandingan antara Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun 2023 sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan sedangkan Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian perkara selamat tahun 2023 dengan jenis perkara Pidana/ kejahatan dan juga pelanggaran lalu lintas. Jumlah perkara yang dihitung adalah jumlah sisa perkara pada tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun 2023 ditambah dengan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2023.

Berikut ini tabel penjelasan jumlah perkara pidana dari sisa akhir tahun 2022 yang harus diselesaikan sampai dengan perkara yang masuk, putus, dan sisa akhir tahun 2023:

Keadaan Perkara Pidana Tahun 2023

Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
Januari	2	19	3	18
Februari	18	8	9	17
Maret	17	24	6	35
April	35	6	23	18
Mei	18	13	16	13
Juni	13	9	5	16
Juli	16	6	12	10
Agustus	10	11	3	18
September	18	8	8	18
Oktober	18	19	12	24
November	24	10	16	18
Desember	18	6	20	0
Jumlah		139	141	

Sumber : Laporan Keadaan Perkara Dilmil I-04 Palembang

Berikut ini tabel penjelasan jumlah penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dari sisa tahun 2022 sampai dengan perkara yang masuk, putus, dan sisa akhir tahun 2023:

Keadaan Perkara Pelanggaran Tahun 2023

Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
Januari	0	1	1	0
Februari	-	-	-	-
Maret	-	4	4	0
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	4	-	4
Oktober	4	-	4	0
November	-	-	-	-
Desember	-	-	-	0
Jumlah		9	9	

Sumber : Laporan Keadaan Perkara Dilmil I-04 Palembang

Untuk lebih jelasnya 2 tabel tersebut dapat dirangkum dalam table berikut ini :

NO.	DILMIL I-04 PALEMBANG	Sisa Tahun 2022	Perkara Diterima Tahun 2023	Perkara Selesai tahun 2023	Sisa tahun 2023	Ket
1.	Pidana Kejahatan	2	139	141	0	-
2.	Pelanggaran	0	9	9	0	-

Sumber : Laporan Keadaan Perkara Dilmil I-04 Palembang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkara pidana/ kejahatan dan pelanggaran lalu lintas militer perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2023 berjumlah 150 dengan 2 perkara sisa tahun 2022 yaitu 141 perkara Pidana/ Kejahatan dan 9 perkara pelanggaran lalu lintas. Perkara yang telah diputus pada tahun 2023 berjumlah 150 perkara dengan sisa perkara berjumlah 0 (nihil) perkara. Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Perkara yang diselesaikan tepat waktu	:	150
Jumlah perkara yang diselesaikan (perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan)	:	150
Realisasi	:	$(150/150) \times 100\% = 100\%$
Capaian	:	$(100/98) \times 100\% = 102\%$

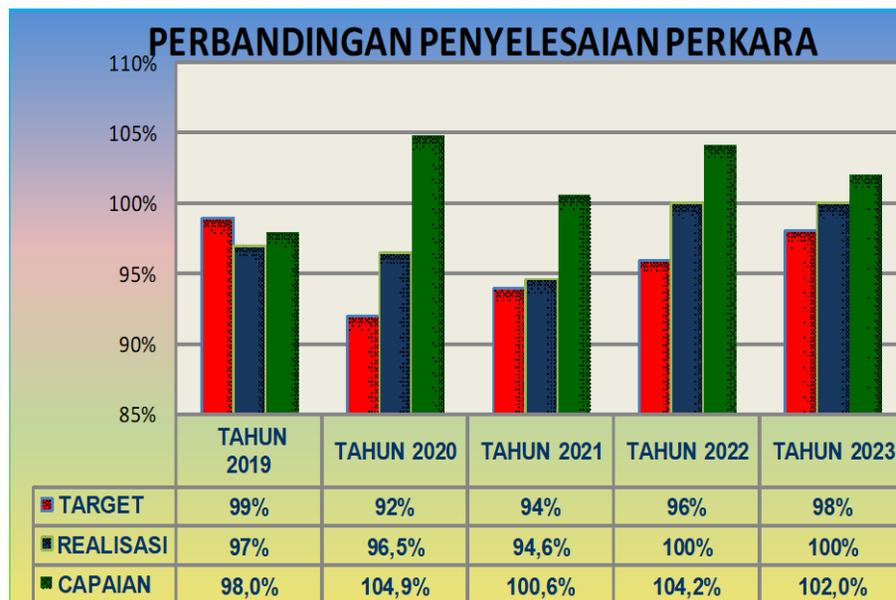
Dengan demikian pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat dikategorikan melebihi target dengan persentase realisasi sebesar 100% (seratus persen) dengan tingkat capaian 104,2%. Pencapaian kinerja pada tahun 2023 yang telah menyelesaikan perkara tidak melebihi 5 (lima) bulan dengan persentase 100% (seratus persen) tanpa terdapat perkara pidana maupun pelanggaran militer diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan.

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian target kinerja pada indikator kinerja Perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 berbanding sama dengan capaian target kinerja pada indikator kinerja Perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018 sampai dengan 2023 sebagaimana tabel dan grafik sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2019	2020	2021	2022	2023	
TARGET	99%	92%	94%	96%	98%	
REALISASI	97%	96,5%	94,6%	100%	100%	
CAPAIAN	98%	104,9%	100,6%	104,2%	102%	

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2019 S/D 2023



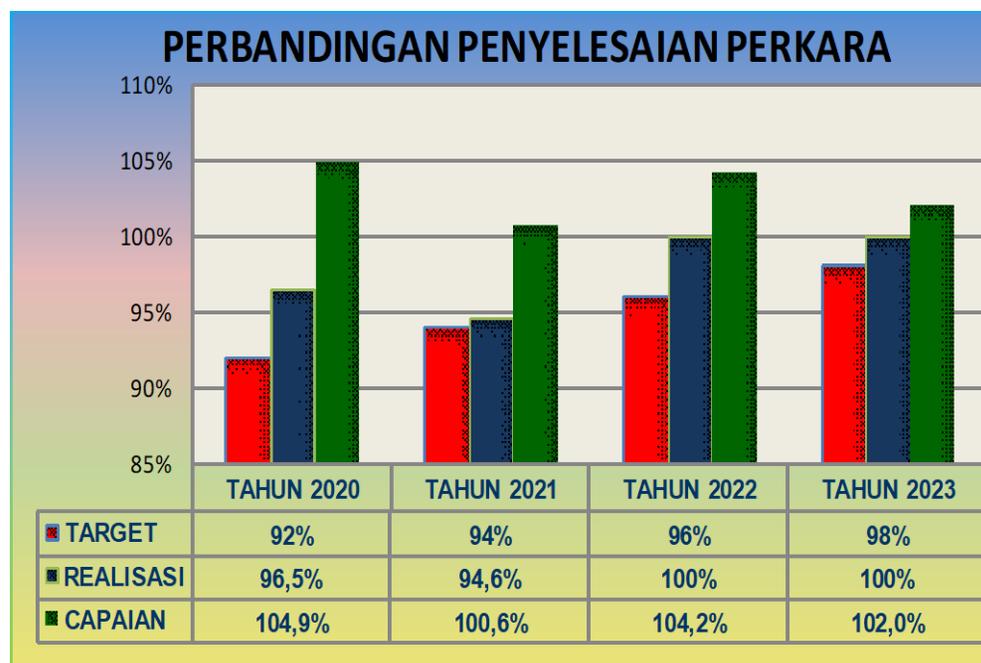
Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja selama 5 tahun terakhir sampai dengan Tahun 2023. Pada tahun 2019 realisasi yang didapatkan adalah 97% dengan capaian target sebesar 98%, pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 96,5% dengan capaian target sebesar 104,9%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 94,6% dengan capaian target sebesar 100,6%, pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 104,2%, dan pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 102%. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi pada tahun 2023 ini masih mencapai 100% sama dengan capaian pada tahun lalu sebagai realisasi tertinggi namun untuk capaian target tertinggi adalah pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan persentase target yang semakin meningkat dari 5 tahun terakhir sampai pada tahun 2023.

c) **Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

berikut ini adalah tabel serta grafik perbandingan realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
TARGET	92%	94%	96%	98%	100%	Memenuhi target jangka menengah
REALISASI	96,5%	94,6%	100%	100%	-	
CAPAIAN	104,9%	100,6%	104,2%	102%	-	

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2020 S/D 2023



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah. Pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 96,5% dengan capaian target sebesar 104,9%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 94,6% dengan capaian target sebesar 100,6%, pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 104,2%, dan pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 104,2%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yang menjadi realisasi tertinggi dibandingkan dengan target realisasi jangka menengah dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Sedangkan untuk Capaian kinerja pada tahun 2023 bila dilihat dari grafik tersebut

mendapatkan peringkat ke 3 teratas dalam 4 tahun terakhir. Maka dapat disimpulkan bahwa capaian target tahun 2023 telah memenuhi target jangka menengah dengan realisasi sebesar 100% dan capaian target sebesar 102%.

d) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pada indikator tersebut berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut menjadi acuan dan standar nasional bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam penyelesaian perkara. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2014 tersebut disebutkan pada point 1 (satu) bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2023 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung telah memenuhi target yang dapat terlihat pada tabel berikut :

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>TARGET</i>		<i>REALISASI</i>	<i>CAPAIAN</i>	<i>Ket</i>
	<i>MARI</i>	<i>SATKER</i>			
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	98%	100%	102%	Memenuhi target Mahkamah agung

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi pencapaian target kinerja Dilmil I-04 Palembang pada indikator kinerja persentase Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 tercapai serta melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 102%. Pencapaian tersebut sejalan dengan harapan Mahkamah Agung agar terciptanya percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Keberhasilan capaian ini tidak terlepas dari baiknya kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku. Disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing serta peran dari Kadilmil I-04

Palembang dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan mendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada. Di lihat dari ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknis pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2023 terdiri dari 6 (enam) Hakim Militer termasuk Kadilmil dan Waka Dilmil. Pada tahun ini pula terdapat pergantian/ mutasi bagi Kadilmil dan Wakadilmil tanggal 5 Juni 2023 serta beberapa anggota Hakim dan unsur kepaniteraan. Pada sub bagian Kepaniteraan ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknis terdiri dari 1 (satu) Panitera, 1 (satu) Panmud Pidana, 1 (satu) Panmud Hukum dan 1 (satu) Panitera Pengganti. Dengan jumlah perkara yang setiap tahunnya memiliki *trend* meningkat jumlah sumber daya manusia di bidang teknis masih kurang terlebih pada jumlah panitera pengganti di Dilmil I-04 Palembang.

Namun demikian strategi percepatan penyelesaian perkara dengan sumber daya manusia (Hakim dan Panitera) yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga target kinerja penyelesaian perkara yang tepat waktu dapat terlaksana dengan baik bahkan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu bisa melebihi target kinerja tahunan.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang. Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2023 antara lain :

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
5. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.

6. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
7. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan dalam percepatan penyelesaian perkara thn 2023.
8. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara tahun 2023.
9. Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

2) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

a) *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023*

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding sedangkan Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian perkara selama tahun 2023 dengan jenis perkara Pidana/ kejahatan dan juga pelanggaran lalu lintas yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dihitung dengan cara jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun 2023 dikurangi jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding. Berikut ini tabel perhitungan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding:

NO.	DILMIL I-04 PALEMBANG	Putus tahun 2023	Upaya Hukum banding	Tidak mengajukan upaya Hukum Banding	Ket
1.	Jumlah Perkara	150	29	121	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang putus dan minutasi pada tahun 2023 adalah sebanyak 150 perkara dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 29 perkara. Dari hasil rekapitulasi tersebut dilakukan pengurangan dari jumlah perkara yang putus dan minutasi tahun 2023 dengan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2023 sebanyak 121 perkara.

Dari hasil tersebut dapat dilakukan perhitungan untuk menghitung persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2023 dengan perhitungan sebagai berikut berikut:

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	:	121
Jumlah perkara yang diselesaikan (perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan)	:	150
Realisasi	:	$(121/150) \times 100\% = 80,6\%$
Capaian	:	$(80/75) \times 100\% = 107,5\%$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 realisasi kinerja yang diperoleh adalah sebesar 80,6% dengan capaian 107,5%. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Dilmil I-04 Palembang telah mencapai target yang telah ditentukan dan melebihi target yaitu sebesar 107,5%.

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian target kinerja pada indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir cenderung bersifat fluktuasi dengan adanya kenaikan dan penurunan besaran capaian kinerja. Berikut dapat dijelaskan jumlah perkara yang diajukan upaya hukum banding dari 5 tahun terkahir :

JUMLAH PERKARA	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2019	2020	2021	2022	2023	
PUTUS	130	137	124	148	150	
BANDING	20	9	16	16	29	
TIDAK BANDING	110	128	108	132	121	

Sumber : Laporan Keadaan Perkara Dilmil I-04 Palembang

Secara sederhana pengertian Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan pengadilan bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim dan dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan bagi salah satu pihak, dan merasa hasil putusan memihak salah satu pihak. Dengan kata lain rasa kepuasan atas suatu putusan pengadilan itu bersifat subjektif bagi siapapun yang menerimanya maka upaya hukum tidak serta merta dapat ditentukan jumlah perkara dengan pasti. Untuk itu perubahan-perubahan realisasi dari beberapa tahun sebelumnya dapat digambarkan secara singkat melalui tabel dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2018	2019	2020	2021	2023	
TARGET	99%	89%	90%	93%	75%	
REALISASI	89%	93,4%	87%	89%	80,6%	
CAPAIAN	90%	104,9%	96,7%	95,7%	107,5%	

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING BANDING TAHUN 2019 S/D 2023



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir yang mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 realisasi yang didapatkan adalah 89% dengan capaian target sebesar 90%, pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 93,4% dengan capaian target sebesar 104,9%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 87% dengan capaian target sebesar 96,7%, pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 89,19% dengan capaian target sebesar 95,9%, dan pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan adalah 80,6% dengan capaian target sebesar 95,9%. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 Dilmil I-04 Palembang telah mencapai target kinerja sebesar 107,5%. Capaian ini merupakan capaian target tertinggi selama 5 tahun terakhir.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

berikut ini adalah tabel serta grafik perbandingan realisasi persentase kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
TARGET	89%	90%	93%	75%	75%	Memenuhi target jangka menengah
REALISASI	93,4%	87%	89%	80,6%	-	
CAPAIAN	104,9%	96,7	95,7%	107,5%	-	

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING TAHUN 2020 S/D 2023



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah. Pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 93,4% dengan capaian target sebesar 104,9%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 87% dengan capaian target sebesar 96,7%, pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 89% dengan capaian target sebesar 95,9%, dan pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan adalah 80,6% dengan capaian target sebesar 95,9%. Dari hasil perhitungan tersebut tersebut, pada tahun 2023 Dilmil I-04 Palembang telah memenuhi target jangka menengah pada tahun 2023 ini.

d) Perbandingan realisasi tahun ini dengan standar nasional

Target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2023 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2023 sebesar 50% sedangkan

Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target lebih tinggi yakni sebesar 75%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI	CAPAIAN	Ket
	MARI	SATKER			
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	50%	75%	80,6%	107,5%	Memenuhi target Mahkamah Agung

e) **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi pencapaian target kinerja Dilmil I-04 Palembang pada indikator kinerja persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan melihat capaian dari tahun ke tahun yang tidak tercapai dan memiliki *trend* meningkatnya jumlah upaya hukum banding maka target yang ditentukan juga mengalami penurunan. Pada tahun ini Dilmil I-04 Palembang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 75% dengan realisasi sebesar 80,6% dan capaian kinerja sebesar 107,5%. Secara umum Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun 2023 telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani pencari keadilan. Adapun faktor penyebab tercapainya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah karena masyarakat / anggota TNI yang berperkara dan Oditur Militer puas terhadap putusan Pengadilan. Para Hakim dan Panitera sebagai tenaga teknis Pengadilan sudah berupaya secara maksimal untuk menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM serta penerapan Hukum Acara Pidana Militer didalam persidangan sehingga terwujudkan pelayanan yang prima. Akan tetapi upaya hukum merupakan hak Terdakwa dan Oditur Militer sehingga rasa keadilan dirasakan sangat subjektif sehingga siapapun yang mendapatkan putusan tersebut bisa saja merasa adil baginya dan bisa pula merasa tidak puas/ tidak adil baginya sehingga mendorong salah satu pihak untuk melakukan upaya hukum Banding guna mendapatkan rasa kepuasan atas hasil putusan tersebut.

"Secara logika hukum (analisis yuridis) semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka menunjukkan tingkat kepuasan atas putusan Pengadilan semakin tinggi" Atas dasar tersebut Dilmil I-04 Palembang telah berusaha memberikan kinerja terbaik dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang telah diterima selama tahun 2023 serta sisa tahun sebelumnya dan

diupayakan bahwa capaian target kinerja jangka menengah akan tetap dapat terpenuhi pada tahun berikutnya.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Seperti dijelaskan di atas bahwa rasa keadilan dirasakan sangat subjektif dan tidak bersifat mutlak. Dilmil I-04 Palembang telah melaksanakan tugas sebagaimana yang seharusnya dengan tercapainya target tersebut dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada. Capaian pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada baik pada unsur Hakim dan unsur Kepaniteraan Dengan jumlah perkara yang setiap tahunnya memiliki *trend* meningkat jumlah sumber daya manusia di bidang teknis masih dirasa kurang terlebih pada jumlah panitera pengganti di Dilmil I-04 Palembang.

Namun demikian strategi percepatan penyelesaian perkara dengan sumber daya manusia (Hakim dan Panitera) yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga target persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dapat tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Koordinasi yang baik dari unsur pimpinan dalam percepatan penyelesaian serta dorongan moril kepada seluruh anggota baik di bidang teknis maupun non teknis untuk selalu menjaga integritas dalam pelaksanaan kinerja sehari-hari memberikan motivasi yang baik dalam pelaksanaan kinerja masing-masing anggota Dilmil I-04 Palembang.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang. Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2023 antara lain :

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.

5. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
6. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
7. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara thn 2023.
8. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraaran dalam proses penyelesaian perkara thn 2023.
9. Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

3) PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

a) *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023*

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan Jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara pada tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi. Lalu perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Proses upaya hukum kasasi berasal dari upaya hukum dari terdakwa atau Oditur setelah ada vonis atau putusan banding dari Pengadilan Tinggi I Medan dan perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Jumlah realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO.	DILMIL I-04 PALEMBANG	Putus tahun 2023	Upaya Hukum Kasasi		Tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	Ket
			(Dari Banding)	Dari TK. I		
1.	Jumlah Perkara	150	14	0	136	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang putus dan minutasi pada tahun 2023 adalah sebanyak 150 perkara dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 14 perkara. Hanya saja dari jumlah upaya hukum tersebut berasal dari upaya hukum dari hasil putusan tingkat Banding ke tingkat kasasi, sedangkan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dari tingkat pertama berjumlah 0 (nol) perkara. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya hukum kasasi lebih banyak berasal dari hasil putusan tingkat banding dibandingkan dengan dari hasil putusan tingkat pertama. Dengan demikian untuk melihat objektifitas capaian kinerja maka yang akan menjadi dasar perhitungan adalah jumlah perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari tingkat pertama yaitu berjumlah 150 perkara. Adapun perhitungan capaian kinerja persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi pada tahun 2023 dengan perhitungan sebagai berikut berikut:

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	:	150
Jumlah perkara yang diselesaikan (perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan)	:	150
Realisasi	:	$(150/150) \times 100\% = 100\%$
Capaian	:	$(100/96) \times 100\% = 104,1\%$

Dengan demikian pencapaian target kinerja pada indikator kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2023 dapat dikategorikan melebihi target dengan persentase realisasi sebesar 100% dengan tingkat realisasi capaian 104,1% bila dibandingkan dengan target capaian sebesar 96%.

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian target kinerja pada indikator kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir cenderung bersifat fluktuasi dengan adanya kenaikan dan penurunan besaran capaian kinerja. Berikut dapat dijelaskan jumlah perkara yang diajukan upaya hukum banding dari 5 tahun terakhir :

JUMLAH PERKARA	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2019	2020	2021	2022	2023	
PUTUS	130	137	124	148	150	
Kasasi (dari Banding)	20	14	9	17	14	
Kasasi (Dari TK. Pertama)	0	9	9	1	0	

Dari tabel diatas dapat terlihat jumlah upaya hukum kasasi dari beberapa tahun terakhir. Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun 2023 adalah realisasi tertinggi dengan capaian 100% sama dengan capaian pada tahun 2019. Hal ini dapat dijelaskan dalam persentase capaian kinerja dari tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2019	2020	2021	2022	2023	
TARGET	99%	89%	90%	93%	96%	
REALISASI	100%	94%	93%	94%	100%	
CAPAIAN	101%	105%	103%	101%	104,1%	

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI TAHUN 2019 s/d 2023



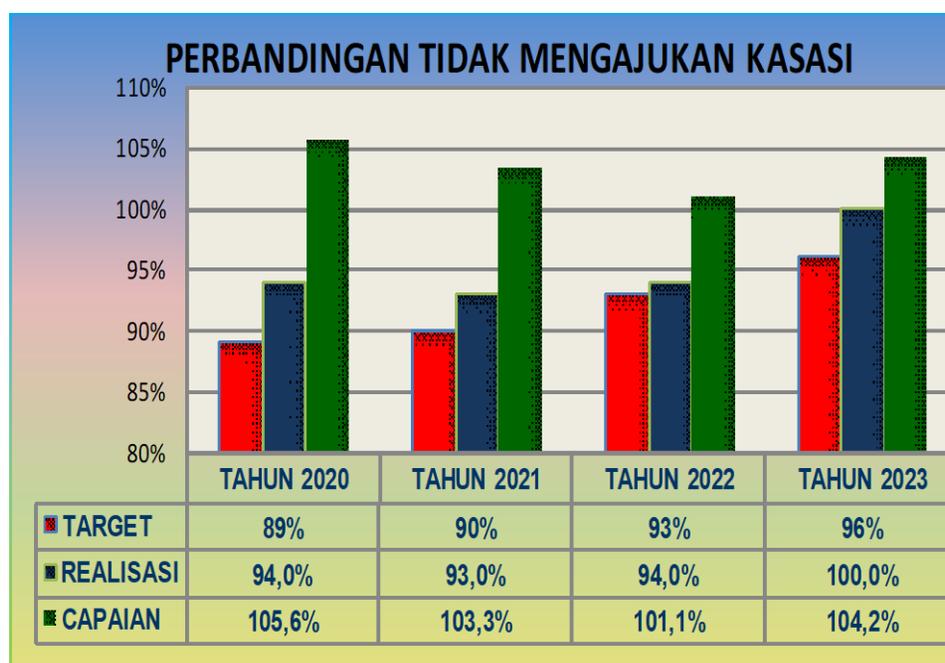
Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 101,6%, pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 93% dengan capaian target sebesar 105%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 93% dengan capaian target sebesar 103%, pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 94% dengan capaian target sebesar 101%, dan pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 104,2%. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi pada tahun 2023 ini adalah capaian target tertinggi kedua bila dibandingkan dengan pencapaian realisasi dari 5 tahun terakhir.

c) **Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

berikut ini adalah tabel serta grafik perbandingan realisasi persentase kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
TARGET	89%	90%	93%	96%	93%	Memenuhi target jangka menengah
REALISASI	94%	93%	94%	100%	-	
CAPAIAN	105%	103%	101%	104,2%	-	

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI TAHUN 2020 S/D 2023



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 Dengan target jangka menengah. Pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 94% dengan capaian target sebesar 105%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 93% dengan capaian target sebesar 103%, pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 94% dengan capaian target sebesar 101%, dan pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 104,2% bila dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan target jangka menengah dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dan telah memenuhi target jangka menengah tahun 2023 yang ditargetkan.

d) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2023 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2023 sebesar 50% sedangkan Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target lebih tinggi yakni sebesar 96%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI	CAPAIAN	Ket
	MARI	SATKER			
Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi	50%	96%	100%	94,4%	Memenuhi target Mahkamah agung

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi pencapaian target kinerja Dilmil I-04 Palembang pada indikator kinerja persentase kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 104,1%. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa upaya hukum merupakan hak Terdakwa dan Oditur Militer bilamana dirasa dari hasil putusan tersebut terdapat ketidak-puasan atas hasil putusan yang dibacakan sehingga rasa keadilan dirasakan sangat subjektif.

Pada pelaksanaannya para Hakim dan Panitera sebagai tenaga teknis Pengadilan sudah berupaya secara maksimal untuk menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM serta penerapan Hukum Acara Pidana Militer didalam persidangan sehingga terwujudkan pelayanan yang prima. Dengan berpegang bahwa "**Secara logika hukum (analisis yuridis) semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka menunjukkan tingkat kepuasan atas putusan Pengadilan semakin tinggi**". Dilmil I-04 Palembang telah melaksanakan tugas sebagaimana yang seharusnya dengan tercapainya target tersebut dan melebihi target yang telah ditetapkan. Diupayakan bahwa capaian target kinerja jangka menengah akan tetap dapat terpenuhi pada tahun berikutnya.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Seperti dijelaskan diatas bahwa rasa keadilan dirasakan sangat subjektif dan tidak bersifat mutlak. Dilmil I-04 Palembang telah melaksanakan tugas sebagaimana yang seharusnya dengan tercapainya target tersebut dan melebihi target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada. Capaian pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada baik pada unsur Hakim dan unsur Kepaniteraan Dengan jumlah perkara yang setiap tahunnya memiliki *trend* meningkat jumlah sumber daya manusia di bidang teknis masih dirasa kurang terlebih pada jumlah panitera pengganti di Dilmil I-04 Palembang.

Namun demikian strategi percepatan penyelesaian perkara dengan sumber daya manusia (Hakim dan Panitera) yang tersedia dapat menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM yang sudah dilaksanakan seoptimal mungkin oleh sumber daya manusia di Dilmil I-04 Palembang sehingga target kinerja penyelesaian perkara yang tepat waktu dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan bahkan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi bisa melebihi target kinerja tahunan dan melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang. Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2023 antara lain :

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
5. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.

6. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahkamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

7. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara thn 2023.

8. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepanitera dalam proses penyelesaian perkara thn 2023.

9. Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

4) INDEX PERSEPSI STAKEHOLDER YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan adalah index yang dihasilkan dari hasil pengisian survei kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan/ pengunjung di Dilmil I-04 Palembang. Secara garis besar masyarakat yang dimaksud adalah semua masyarakat pengguna layanan di Dilmil I-04 Palembang , antara lain pengunjung sidang, para saksi, para pencari keadilan, satuan samping (Otmil I-05 Palembang, Pomdam II/Swj, Lanal Palembang dan Kumdam II/Swj. Survei dilaksanakan selama para pengunjung hadir di lingkungan Dilmil I-04 Palembang secara langsung ataupun jikalau dalam pelaksanaan sidang keliling para penerima layanan diberikan angket survei untuk melihat pelayanan yang telah dilakukan oleh Dilmil I-04 Palembang. Survei ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang besar kepada perubahan yang lebih baik dalam pelaksanaan kinerja Dilmil I-04 Palembang.

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

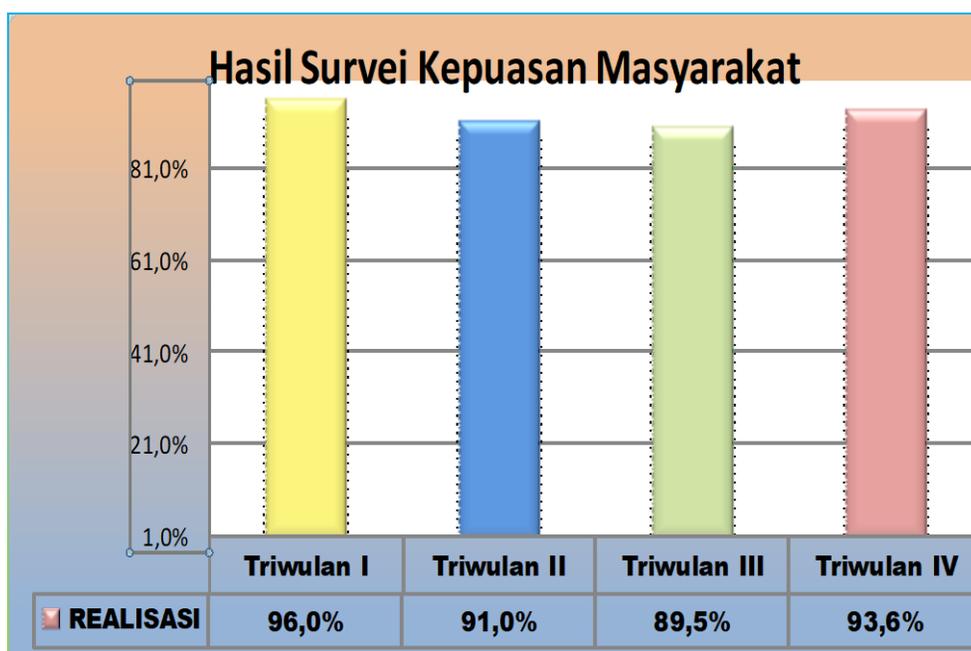
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Rekapitulasi hasil survei ini terbagi atas 4 waktu pelaksanaan yaitu survei pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV. Jumlah survei yang dikumpulkan pada setiap triwulannya diupayakan semaksimal mungkin dengan sistem *simple random sampling* atau dengan kata lain pengambilan secara acak kepada para masyarakat penerima layanan. Perhitungan capaian realisasi survei pada tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel dan grafik berikut ini:

Index Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan (TW I + TW II + TW III + TW IV)	:	96 + 91 + 89,5+ 93,6
Realisasi (Jumlah TW I sampai TW IV Dibagi 4)	:	92,5
Capaian	:	$(92,5/92) \times 100 = 100,5\%$



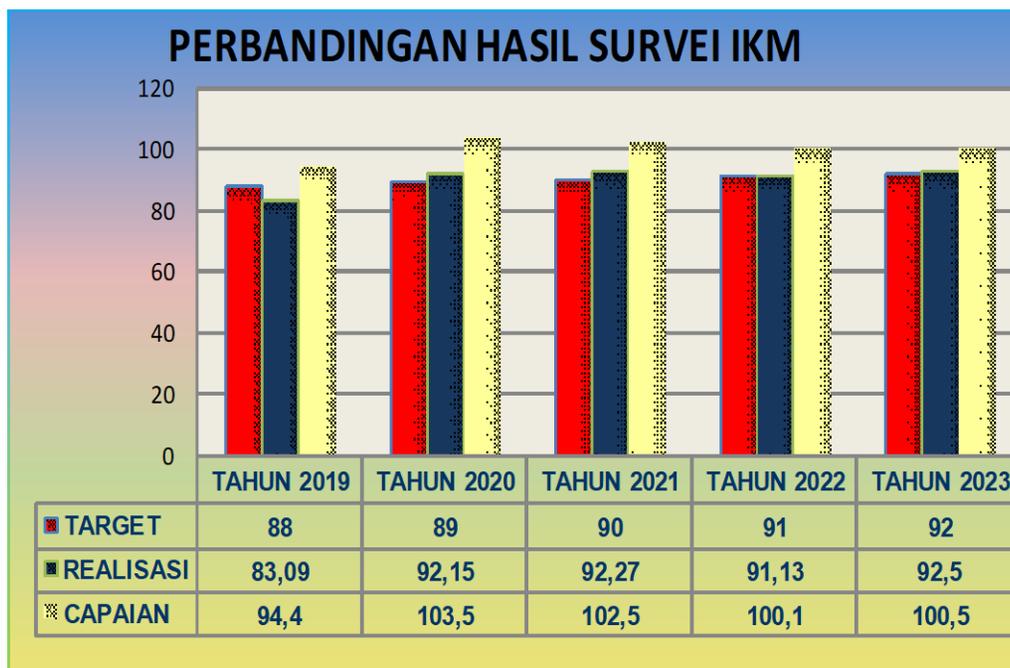
Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat nilai dari hasil survei kepuasan masyarakat pada setiap triwulan pada tahun 2023. Pada triwulan I nilai survei kepuasan masyarakat adalah 96%, pada triwulan II nilai survei kepuasan masyarakat adalah 91%, pada triwulan III nilai survei kepuasan masyarakat adalah 89,5%, dan pada triwulan IV nilai survei kepuasan masyarakat adalah 93,6%. Dari hasil tersebut dilakukan penjumlahan dari tiap-tiap triwulan dan menghasilkan nilai realisasi sebesar 92,5% yang kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan target capaian dan hasilnya adalah sebesar 100,5%. Dengan demikian pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 dapat dikategorikan melebihi target dengan persentase realisasi sebesar 92,5% dengan tingkat capaian target 100,5%.

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian target kinerja pada indikator kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir cenderung meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat digambarkan melalui tabel dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2019	2020	2021	2022	2023	
TARGET	88	89	90	91	92	
REALISASI	83,09	92,15	92,25	91,7	92,5	
CAPAIAN	94,4	103,5	102,5	100,1	100,5	

**GRAFIK PERBANDINGAN INDEX PERSEPSI STAKEHOLDER YANG PUAS
TERHADAP LAYANAN PERADILAN TAHUN 2018 s/d 2023**



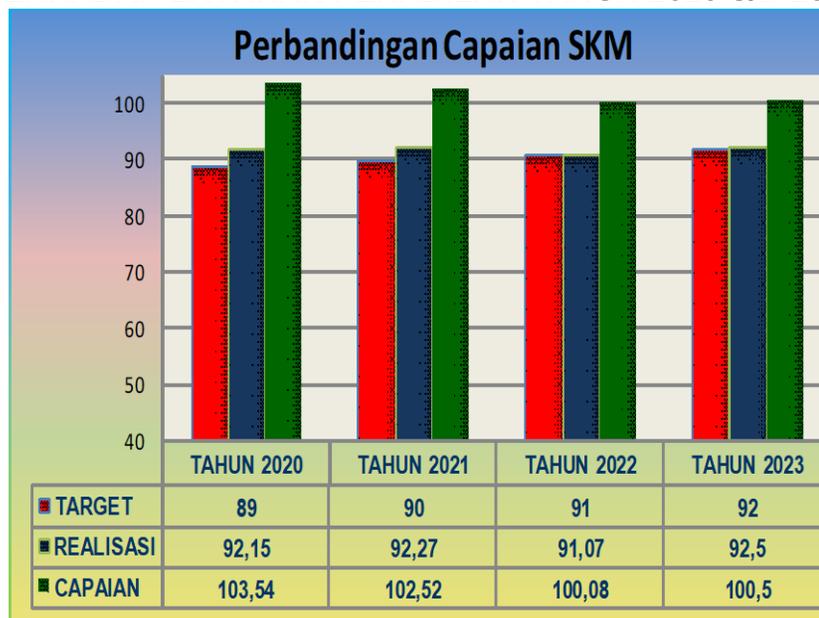
Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 realisasi yang didapatkan adalah 80,09 dengan capaian target sebesar 91, pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 92,15 dengan capaian target sebesar 103,5, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 92,27 dengan capaian target sebesar 102,5, pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 91,13 dengan capaian target sebesar 100,1 dan pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan adalah 92,5 dengan capaian target sebesar 100,5. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi pada tahun 2020 adalah pencapaian tertinggi bila dibandingkan dengan pencapaian realisasi dari 5 tahun terakhir namun untuk capaian target terendah adalah pada tahun 2019.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

berikut ini adalah tabel serta grafik perbandingan realisasi persentase kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2023	2023	2024	
TARGET	89	90	91	92	92	Memenuhi target jangka menengah
REALISASI	92,15	92,27	91,07	92,5	-	
CAPAIAN	103,5	102,5	100,1	100,5	-	

GRAFIK PERBANDINGAN INDEX PERSEPSI STAKEHOLDER YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN TAHUN 2020 S/D 2023



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah. Pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 92,15 dengan capaian target sebesar 103,5%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 92,27 dengan capaian target sebesar 102,5%, pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 91,13 dengan capaian target sebesar 100,1%. dan pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan adalah 92,5 dengan capaian target sebesar 100,5%. bila dibandingkan dengan capaian target tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan target jangka menengah dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Dari hasil tersebut dapat dikatakan pencapaian pada tahun 2023 telah memenuhi target jangka menengah dengan capaian target sebesar 100,5%.

d) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/Sek/SK/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditetapkan bahwa nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus lebih dari 80. Berdasarkan Keputusan

Sekma tersebut target kinerja pada indikator kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2023 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2023 dengan nilai IKM sebesar 80 sedangkan Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target lebih tinggi dengan nilai IKM sebesar 91, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI	CAPAIAN	Ket
	MARI	SATKER			
Persentase Hasil Survei IKM	80%	92%	92,5%	100,5%	Memenuhi target Mahkamah agung

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi pencapaian target kinerja Dilmil I-04 Palembang pada indikator kinerja Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 100,5%. Dilmil I-04 Palembang telah berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam memberikan keterbukaan informasi pada tahun 2023 Dilmil I-04 Palembang serta Dilmil I-04 Palembang juga membantu mahasiswa dari STIHPADA dalam mengikuti Kompetisi Moot Court Peradilan Militer Piala tetap Kepala Staf Angkatan Darat tahun 2023 yang diikuti oleh universitas/ sekolah tinggi se-Indonesia. Selain itu Dilmil I-04 Palembang juga menjadi tempat magang bagi mahasiswa fakultas hukum dari beberapa perguruan tinggi yaitu Universitas Sriwijaya (UNSRI) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dan tempat magang bagi siswa-siswi yang berasal dari Palembang Computer and Technology (Palcomtech) cabang OPI, SMK Negeri 8 Kota Palembang dan SMK Negeri 1 Pemulutan, Palembang. Dilmil I-04 Palembang juga selalu memberikan keterbukaan informasi melalui media social, website, aplikasi pelayanan, banner dan spanduk, serta inovasi penempelan stiker pelayanan di beberapa satuan kerja yang berhubungan langsung dengan pelayanan Dilmil I-04 Palembang. Serta aplikasi unggulan Dilmil I-04 Palembang yaitu: AMPERA, E-LADILMIL, PESAN DILAN dan SETIA KAWAN.

**Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Militer I-04 Palembang**

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor				Kategori	Peringkat
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Persyaratan	3,854	3,472	3,533	3,581	SANGAT BAIK	7
2.	Sistem Mekanisme, Prosedur	3,771	3,528	3,467	3,535	SANGAT BAIK	8
3.	Waktu Penyelesaian	3,771	3,5	3,433	3,581	SANGAT BAIK	9
4.	Biaya/Tarif	3,896	3,889	3,567	3,814	SANGAT BAIK	2
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,854	3,667	3,6	3,605	SANGAT BAIK	6
6.	Kompetensi Pelaksana	3,917	3,694	3,567	3,767	SANGAT BAIK	5
7.	Perilaku Pelaksana	3,875	3,667	3,6	3,907	SANGAT BAIK	4
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,938	3,667	3,6	3,93	SANGAT BAIK	3
9.	Sarana dan Prasarana	3,938	3,889	3,867	3,977	SANGAT BAIK	1

Dari tabel diatas dapat terlihat peringkat dari yang tertinggi sampai terendah dalam penilaian masyarakat atas pelayanan Dilmil I-04 Palembang. Nilai tertinggi ada pada indikator sarana dan prasarana yang ada di Dilmil I-04 Palembang. Salah satu yang menjadi unggulan adalah adanya ruang istirahat berupa gazebo, ruang bermain anak, kantin kejujuran, *Acess to Justice* yang *up to date* dengan menggunakan media sosial dan aplikasi berbasis web serta pelayanan pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan nilai terendah ada pada indikator waktu penyelesaian dimana pada bagian tersebut memiliki pertanyaan “Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?”. Dari hasil survei ditemukan bahwa salah satu yang menjadi penilaian masyarakat adalah ketidaktepatan dalam waktu pelaksanaan sidang dengan jadwal yang telah disampaikan.

Pelaksanaan persidangan tidak terlepas dari elemen-elemen yang mendukung pelaksanaan sidang selain petugas peradilan seperti Oditur, Penasehat Hukum, para saksi, dan terdakwa itu sendiri. Secara garis besar Dilmil I-04 Palembang telah menetapkan waktu yang terbaik dalam pelaksanaan sidang hanya saja kadang kala sidang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya dikarenakan beberapa pihak yang ikut dalam pelaksanaan sidang tersebut belum hadir tepat pada waktunya. Untuk itu Kadilmil dalam monitoring dan evaluasi kinerja memberikan himbauan agar pelaksanaan persidangan dapat dilaksanakan tepat waktu serta jangan sampai keterlambatan disebabkan oleh anggota Dimil I-04 Palembang itu sendiri seperti majelis hakim, panitera

pengganti maupun petugas sidang. Selain itu Kadilmil mengingatkan tentang proses administrasi perkara dan administrasi persidangan dibuat sesuai dengan format yang benar. Upaya-upaya ini telah dilakukan dan akan dilakukan terus kedepannya dengan harapan dapat memberikan *outcome* yang baik bagi masyarakat pengguna layanan di Dilmil I-04 Palembang.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada saat ini Dilmil I-04 Palembang telah berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat pencari keadilan ataupun pengunjung yang datang di Dilmil I-04 Palembang. Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang teknis seperti Hakim dan Panitera telah berupaya dalam memberikan pelayanan dalam menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM yang sudah dilaksanakan. Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang non teknis juga telah berupaya terbaik dalam melakukan pelayanan dengan mengupayakan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan Pengadilan secara umum dan memerikan rasa nyaman bagi masyarakat ataupun pengunjung sidang.

Beberapa penilaian yang cenderung positif ada pada sarana dan prasarana yang ada pada Dilmil I-04 Palembang. Nilai tertinggi ke dua ada pada tarif pelayanan karena Dilmil I-04 Palembang tidak menetapkan tarif/ gratis dan tidak melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan. Nilai tertinggi ke 3 ada pada perilaku pelaksana atau secara keseluruhan anggota di Dilmil I-04 Palembang. Hal ini menggambarkan seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang telah mampu menjaga marwah Mahkamah Agung RI secara khusus profesionalisme Dilmil I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang. Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2023 antara lain :

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
5. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
6. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahkamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
7. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara thn 2023.
8. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara thn 2023.
9. Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

B

Sasaran: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

1) *Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.*

Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan Jumlah perkara yang diselesaikan (perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan). Berikut ini tabel perbandingan pencapaian target kinerja Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu:

Bulan	Putus	Dikirim ke Oditur dan Terdakwa	Ket
Januari	3	3	
Februari	9	9	
Maret	6	6	
April	23	23	
Mei	16	16	
Juni	5	5	
Juli	12	12	
Agustus	3	3	
September	8	8	
Oktober	12	12	
November	16	16	
Desember	20	20	
Jumlah	150	150	

Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	:	150
Jumlah putusan	:	150
Realisasi	:	$(150/150) \times 100\% = 100\%$
Capaian	:	$(100/100) \times 100\% = 100\%$

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu	100 %	100 %	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan persentase Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu adalah 100% sehingga jika dibandingkan dengan target realisasi sebesar 100% maka menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%: Dengan demikian pencapaian target kinerja pada indikator Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu pada tahun 2023 dapat dikategorikan mencapai target dengan persentase realisasi sebesar 100% dengan tingkat realisasi capaian 100% bila dibandingkan dengan target capaian sebesar 100%.

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu pada tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir cenderung sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat digambarkan melalui tabel dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2019	2020	2021	2022	2023	
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	
REALISASI	100%	100%	100%	100%	100%	
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%	100%	

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE
PARA PIHAK TEPAT WAKTU TAHUN 2018 S/D 2023**



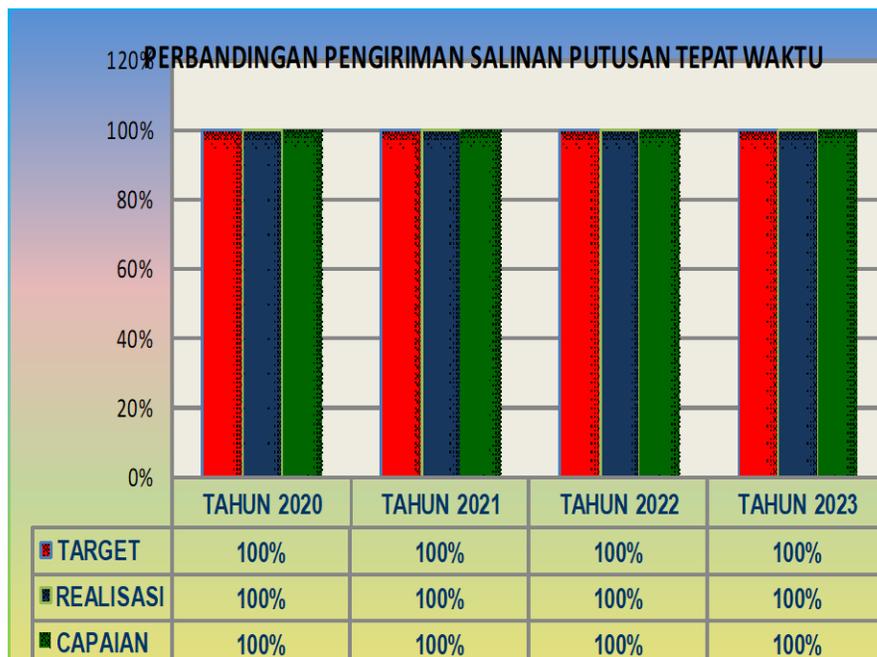
Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dari tabel tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Dilmil I-04 Palembang selama 5 tahun terakhir dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan realisasi selama 5 tahun berturut-turut sebesar 100% dengan target 100% serta realisasi capaian sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

berikut ini adalah tabel serta grafik perbandingan persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2023	2023	2024	
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	Memenuhi target jangka menengah
REALISASI	100%	100%	100%	100%	-	
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%	-	

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE
PARA PIHAK TEPAT WAKTU TAHUN 2020 s/d 2023**



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat perbandingan persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu tahun 2023 dengan tahun lalu dan target jangka menengah, dari tabel tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Dilmil I-04 Palembang selama 3 tahun terakhir dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan realisasi selama 3 tahun berturut-turut sebesar 100% dengan target 100% serta realisasi capaian sebesar 100%.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Capaian pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2023 berpedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, pada point 2 (dua) dinyatakan bahwa “untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHP”. Dengan demikian target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2023 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2023 sebesar 20% sedangkan Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target maksimal yakni

sebesar 100%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>TARGET</i>		<i>REALISASI</i>	<i>CAPAIAN</i>	<i>Ket</i>
	<i>MARI</i>	<i>SATKER</i>			
persentase salinan putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	20%	100%	100%	100%	Memenuhi target Mahkamah Agung

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi pencapaian target kinerja Dilmil I-04 Palembang pada indikator kinerja persentase kinerja salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 100% bahkan bernilai sama dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dan memenuhi target jangka menengah. Keberhasilan capaian ini juga tidak terlepas dari baiknya kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku. Disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian merupakan faktor penting serta peran penting dari Kadilmil I-04 Palembang dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan serta kinerja seluruh anggota dalam mendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

Pencapaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan capaian 100% (seratus persen) pada tahun 2018 sampai dengan 2023 menunjukkan Aparatur Teknis dan Non Teknis pada Pengadilan Militer I-04 Palembang konsisten dalam pelaksanaan indikator kinerja tersebut berpedoman pada SEMA Nomor 01 Tahun 2011. Selain itu disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada saat ini Dilmil I-04 Palembang telah berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat pencari keadilan ataupun pengunjung yang datang di Dilmil I-04 Palembang. Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang teknis seperti Hakim dan Panitera telah berupaya dalam memberikan pelayanan dalam menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM yang sudah dilaksanakan. Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang non teknis juga telah berupaya terbaik dalam melakukan pelayanan dengan mengupayakan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan Pengadilan secara umum dan memerikan rasa nyaman bagi masyarakat ataupun pengunjung sidang.

Pada Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu telah diupayakan oleh Dilmil I-04 Palembang dalam pelaksanaannya. Dengan sumber daya manusia yang tersedia pada bagian persuratan maupun pada bagian pengarsipan dapat berjalan dengan baik walaupun pada saat ini Dilmil I-04 Palembang belum memiliki ASN fungsional dalam bidang Arsiparis tetapi dengan kekuatan anggota yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian tugas secara proporsional. Dengan komposisi tenaga teknis dan non teknis tersebut pada tahun 2023 Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat menyampaikan salinan putusan dari semua perkara yang ditangani sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh) perkara tanpa ada salinan putusan yang terlambat dalam penyampiannya kepada Oditur ataupun terdakwa.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang. Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2023 antara lain :

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.

4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
5. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
6. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
7. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara thn 2023.
8. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara thn 2023.
9. Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara



Sasaran: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

1) *Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.*

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang harus di rensid (rencana sidang) di luar Gedung Pengadilan. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 100 %. Perkara yang direncanakan sidang di Luar Gedung Kantor dapat diputus sebanyak 19 (sembilan belas) perkara dari 19 (sembilan belas) perkara yang di rensidkan. Berikut adalah tabel pelaksanaan sidang keliling pada tahun 2023:

Bulan	Dirensid	Putus	Ket
Januari	-	-	
Februari	-	-	
Maret	-	-	
April	9	9	Lampung (6) dan Bengkulu (3)
Mei	-	-	
Juni	-	-	
Juli	-	-	
Agustus	-	-	
September	-	-	
Oktober	10	10	Lampung (10)
November	-	-	
Desember	-	-	
Jumlah	19	19	

Dari data diatas dapat diketahui terdapat 19 perkara yang telah dilaksanakan diluar gedung pengadilan Dilmil I-04 Palembang. Dapat dijelaskan bahwa terdapat 9 perkara yang dilaksanakan sidang keliling pada bulan April 2024 dengan 6 perkara dilaksanakan di Lampung bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung dan 3 perkara di Bengkulu bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Kemudian sidang diluar gedung pengadilan dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 sebanyak 10 perkara yang dilaksanakan di UPT Oditurat Militer I-05 Bandar Lampung. Dari hasil tersebut, langkah selanjutnya adalah perhitungan capaian target selama tahun 2023 dengan perhitungan sebagai berikut.

Jumlah putusan	:	19
Jumlah Perkara yang di rensid	:	19
Realisasi	:	$(19/19) \times 100\% = 100\%$
Capaian	:	$(100/100) \times 100\% = 100\%$

Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah perkara yang telah dirensid sebanyak 19 perkara dan perkara yang telah berhasil diputus adalah sebanyak 19 Perkara. Dari hasil tersebut maka dapat dilakukan perhitungan perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dibagi dengan jumlah perkara yang dirensidkan dikalian 100% yang menghasilkan realisasi sebesar 100%. Lalu setelah dibandingkan dengan target capaian maka menghasilkan capaian sebesar 100%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Dilmil I-04 Palembang telah mencapai target yang telah ditentukan.

Akan tetapi pada tahun ini Dilmil I-04 Palembang mendapatkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk pelaksanaan sidang keliling. ABT tersebut berkenaan dengan adanya permintaan dari Korem 042/Gapu agar Dilmil I-04 Palembang dapat melaksanakan sidang keliling tambahan di Jambi bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Pada kesempatan ini jumlah perkara yang akan dilaksanakan persidangan berjumlah 12 perkara dengan hasil 11 perkara dapat diputus saat pelaksanaan sidang luar gedung pengadilan.

2) *Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir*

Perbandingan capaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir cenderung sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja pada tahun 2021 menjadi pencapaian terkecil selama 5 tahun terakhir. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2019	2020	2021	2022	2023	
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	
REALISASI	100%	100%	91%	100%	100%	
CAPAIAN	100%	100%	91%	100%	100%	

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN TAHUN 2019 s/d 2023



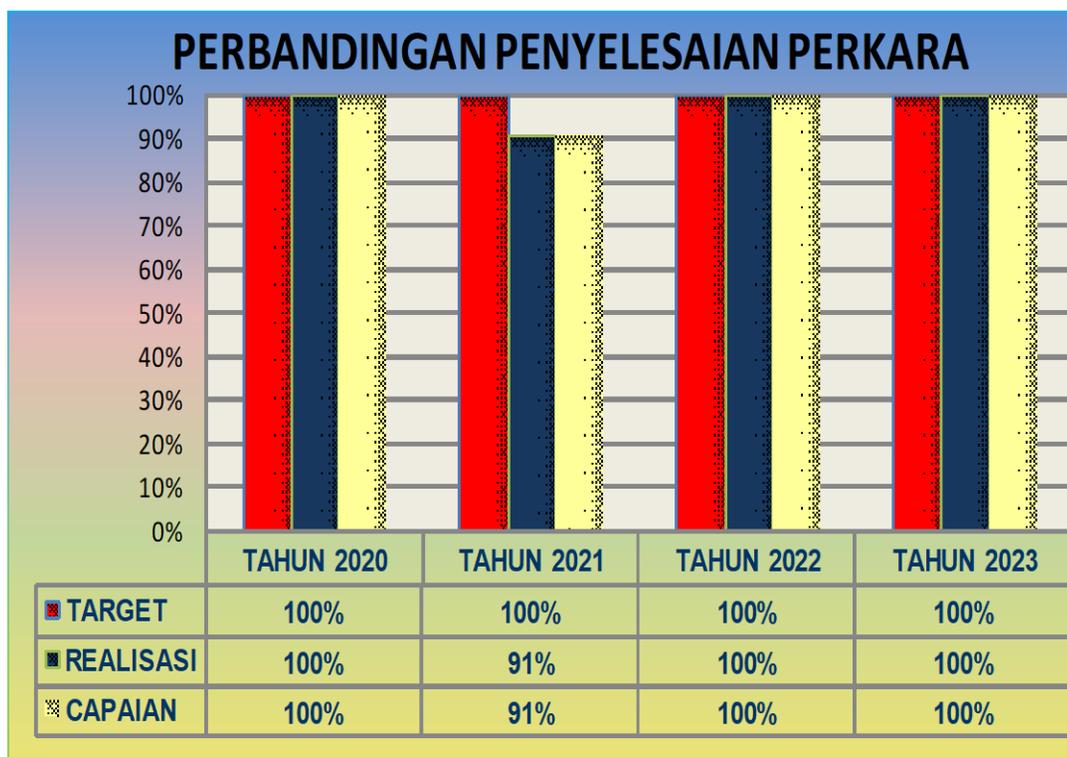
Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Dari tabel tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Dilmil I-04 Palembang pada tahun 2018 sampai 2020 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan akan tetapi pada tahun 2021 tidak dapat memenuhi target tersebut. Pada tahun 2023 Dilmil I-04 Palembang berhasil mencapai target dengan capaian target sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

berikut adalah tabel serta grafik perbandingan Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan tahun 2023 dengan target jangka menengah dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2023	2023	2024	
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	Memenuhi target jangka menengah
REALISASI	100%	91%	100%	100%	-	
CAPAIAN	100%	91%	100%	100%	-	

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN
DILUAR GEDUNG PENGADILAN TAHUN 2020 S/D 2023**



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat perbandingan persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu tahun 2023 dengan tahun lalu dan target jangka menengah. dari tabel tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Dilmil I-04 Palembang pada tahun 2020, 2022 dan 2023 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian target sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2021 Dilmil I-04 Palembang tidak dapat memenuhi capaian target dengan capaian target sebesar 91%.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) pada Pengadilan Militer I-05 Palembang dilaksanakan sesuai standar nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Capaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan

diluar gedung Pengadilan (sidang keliling) pada Pengadilan Militer I-05 Palembang tahun 2023 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI adalah sama bahwa Mahkamah Agung RI menetapkan target pada tahun 2023 sebesar 100% demikian pula Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target maksimal sebesar 100%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>TARGET</i>		<i>REALISASI</i>	<i>CAPAIAN</i>	<i>Ket</i>
	<i>MARI</i>	<i>SATKER</i>			
persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	Memenuhi target Mahkamah Agung

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi pencapaian target kinerja Dilmil I-04 Palembang pada indikator kinerja persentase kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2023 memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 100% Keberhasilan capaian ini juga tidak terlepas dari baiknya kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku. Disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian merupakan faktor penting serta peran penting dari Kadilmil I-04 Palembang dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan serta kinerja seluruh anggota dalam mendukung terpenuhinya target kinerja tersebut. Dilmil I-04 Palembang telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai serta mempertahankan capaian kinerja yang telah baik selama beberapa tahun terakhir ini dengan harapan capaian tersebut dapat tercapai kembali di tahun-tahun berikutnya.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada saat ini Dilmil I-04 Palembang telah berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat pencari keadilan ataupun pengunjung yang datang di Dilmil I-04 Palembang. Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang teknis seperti Hakim dan Panitera telah berupaya dalam memberikan pelayanan dalam menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM yang sudah dilaksanakan. Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang non teknis juga telah berupaya terbaik dalam melakukan pelayanan dengan mengupayakan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan

Pengadilan secara umum dan memerikan rasa nyaman bagi masyarakat ataupun pengunjung sidang.

Pada Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan telah diupayakan oleh Dilmil I-04 Palembang dalam pelaksanaannya. Dengan sumber daya manusia (Hakim dan Panitera) yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian tugas penyelesaian perkara secara proporsional, Kadilmil dan Wakadilmil juga melaksanakan persidangan sesuai komposisi Majelis Hakim yang tersedia di unit kerja sehingga mampu mewujudkan pencapaian target kinerja tahunan yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) tersebut tidak terlepas pula dukungan kinerja para Staf baik pada bagian Kepaniteraan maupun pada bagian Kesekretariatan yang berada di satuan ketika sidang keliling dilaksanakan, seperti penginputan data perkara pada aplikasi SIPP harus dilakukan di satuan. Dengan kerjasama semua bagian tersebut capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) tahun 2023 dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Akan tetapi, pada tahun ini terdapat permintaan tambahan pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara sebanyak 12 perkara oleh Korem 42/Gapu. Hal ini menjadi catatan dan perhatian khusus oleh Dilmil I-04 Palembang. Pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan menjadi cara dalam percepatan penyelesaian perkara yang dilaksanakan oleh Dilmil I-04 Palembang dalam melaksanakan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dimana para pencari keadilan mendapat pelayanan peradilan tidak harus di gedung Dilmil I-04 Palembang.

Hanya saja dalam pelaksanaannya tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Pada tahun ini Dilmil I-04 Palembang mendapat anggaran sidang diluar gedung pengadilan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang pada keadaan riilnya hanya dapat melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan sebanyak 3 kali saja. Maka dari itu Dilmil I-04 Palembang melakukan permohonan anggaran biaya tambahan agar dapat melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan ke 4 kali atas permintaan dari Korem 42/Gapu. Maka dari itu diharapkan adanya penambahan anggaran agar Dilmil I-04 Palembang dapat melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan sebanyak 4 kali mengingat Dilmil I-04 Palembang memiliki wilayah yurisdiksi sebanyak 5 provinsi.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang. Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2023 antara lain :

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
5. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
6. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
7. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara thn 2023.
8. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara thn 2023.
9. Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan *outcome* dan *output*. Program kerja Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada terdapat 3 (tiga) program kerja yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja Dilmil I-04 Palembang.

3 (tiga) Program Kerja yang harus dilakukan tersebut antara lain :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Dalam pelaksanaan program kerja tersebut Dilmil I-04 Palembang mendapat 2 (dua) jenis Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA yang berasal dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (DIPA 01) dan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

1. PENGELOLAAN KEUANGAN

a. Pengelolaan Keuangan DIPA 01 (BUA)

Dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang No.17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara yang bertujuan menyempurnakan manajemen belanja Negara guna peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan, Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai salah satu instansi Pemerintah yang berada dalam Lingkungan Mahkamah Agung, pada awal tahun anggaran 2023 telah menerima “DIPA PETIKAN ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2023” dengan Nomor : 005-01-2-663211/2023 tanggal 30 November 2022 dengan PAGU sebesar Rp. 4.809.040.000.00 (empat milyar delapan ratus sembilan juta empat puluh ribu rupiah), dalam kurun waktu 2023 DIPA BUA mengalami 10 (sepuluh) kali Revisi DIPA yang terdiri dari :

- Revisi ke 1 (satu) pada tanggal 13 Februari 2023
- Revisi ke 2 (dua) pada tanggal 14 April 2023
- Revisi ke 3 (tiga) pada tanggal 19 Juni 2023
- Revisi ke 4 (empat) pada tanggal 27 Juni 2023
- Revisi ke 5 (lima) pada tanggal 15 Juli 2023
- Revisi ke 6 (enam) pada tanggal 01 September 2023
- Revisi ke 7 (tujuh) pada tanggal 16 Oktober 2023
- Revisi ke 8 (delapan) pada tanggal 20 November 2023
- Revisi ke 9 (sembilan) pada tanggal 01 Desember 2023
- Revisi ke 10 (sepuluh) pada tanggal 13 Desember 2023

a.1. Belanja Pegawai

Data penyerapan anggaran belanja pegawai Tahun 2023 Pengadilan Militer I-04 Palembang :

No	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Ket
-	2.792.986.000	2.543.086.768	249.899.232	91,05	

a.2. Belanja Barang

Data penyerapan anggaran belanja barang tahun 2023 Pengadilan Militer I-04 Palembang :

No	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Ket
-	1.437.024.000	1.427.817.756	9.206.244	99,36	

a.3. Belanja Modal

Data penyerapan anggaran belanja modal tahun 2023 Pengadilan Militer I-04 Palembang :

No	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Ket
-	579.030.000	577.205.000	1.825.000	99,68	

Bahwa realisasi penyerapan Anggaran DIPA (01) BUA MARI Tahun 2023 berdasarkan tabel diatas adalah sebesar Rp 4.548.109.524,00 (empat milyar lima ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan realisasi sebesar 94,57 % (sembilan puluh empat koma lima puluh tujuh) dengan sisa pagu sebesar Rp 260.930.476,00 (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 5,43 % (lima koma empat puluh tiga).

b. Pengelolaan Keuangan DIPA 05 (Direktorat Badilmiltun)

Data penyerapan pengelolaan anggaran untuk DIPA 05 (Ditjen) Badilmiltun MA RI TA. 2023 Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Ket
1.	Belanja Opr Perkara	76.680.000	73.454.750	3.225.250	94,68	
2.	Sidang Keliling	95.000.000	94.955.000	45.000	99,95	

Bahwa realisasi penyerapan Anggaran DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MARI Tahun 2023 berdasarkan tabel diatas adalah sebesar Rp 168.409.750,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar 98,10 % (sembilan puluh delapan koma sepuluh) persen dengan sisa pagu sebesar Rp 3.270.250,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau 1,90 % (satu koma sembilan puluh) persen.

Pada tahun ini pula Dilmil I-04 Palembang mendapatkan Anggaran Biaya tambahan untuk pelaksanaan sidang keliling dengan jumlah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Ket
2.	Sidang Keliling (ABT pada DIPA 01)	34.760.000	34.760.000	0	100	

2. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

IKPA merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pada prinsipnya, penilaian IKPA diberlakukan untuk kinerja pelaksanaan anggaran satu tahun anggaran penuh. Untuk Tahun 2023, IKPA tidak dilakukan reformulasi, namun terdapat perubahan ketentuan dan probis IKPA yang meliputi 8 indikator, yaitu :indikator revisi DIPA, indikator revisi halaman III DIPA, indikator penyerapan anggaran, indikator belanja kontraktual, indikator penyelesaian tagihan, indikator pengelolaan UP dan TUP, indikator dispensasi SPM, dan indikator capaian output.

Pada tahun 2023, kantor Pengadilan Militer I-04 Palembang mendapatkan nilai IKPA secara keseluruhan sebesar 95,48. Nilai tersebut diperoleh dari penilaian 8 indikator yang telah dijelaskan di atas. Dari 8 indikator tersebut, kantor Pengadilan Militer I-04 Palembang mendapatkan nilai penuh 100 untuk 5 indikator seperti indikator revisi DIPA, indikator penyelesaian tagihan, indikator pengelolaan UP dan TUP, indikator dispensasi SPM dan indikator capaian output, sedangkan 3 indikator lainnya seperti indikator deviasi halaman III DIPA memperoleh nilai 70,11 indikator penyerapan anggaran memperoleh nilai 96,85 dan indikator belanja kontraktual memperoleh nilai 91,00. Untuk indikator deviasi halaman III DIPA yang hanya memperoleh nilai 70,11 disebabkan oleh kurangnya konsistensi antara rencana penarikan dana yang telah ditetapkan dengan realisasi penarikan dana itu sendiri, sehingga terjadi margin yang menyebabkan penilaian menjadi kurang baik. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi jika perencanaan dan pelaksanaan anggaran tersebut dikelola secara baik dan terkontrol, misalnya dari mulai penentuan penarikan dana memang didasarkan pada pengeluaran yang rutin, lalu setelah itu pelaksanaan realisasinya dikontrol dan dievaluasi secara berkala sehingga ketika ditemukan masalah dalam pelaksanaan anggaran dapat langsung diselesaikan dan tujuan dapat diarahkan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu untuk indikator belanja kontraktual dan indikator penyerapan anggaran yang juga tidak mendapatkan nilai maksimal disebabkan oleh alasan yang serupa dengan indikator deviasi halaman III DIPA, yaitu kurangnya monitoring dan evaluasi dari berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan anggaran. Untuk itu diharapkan pada tahun anggaran 2024, masalah-masalah terkait dengan monitoring dan evaluasi terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak terjadi lagi sehingga nilai IKPA bagi kantor Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat maksimal.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan tindak lanjut atau respons atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan rencana strategis.

LKjIP Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI secara garis besar, Dirjen Badilmiltun MARI, dan tentunya secara khusus Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang. Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan acuan dari Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaharuan Peradilan Indonesia 2010-2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan dari laporan kinerja ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2023 ini secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat keberhasilan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun anggaran 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen *control* yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Militer I-04 Palembang.
3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi *reward and punishment*.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Satker Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Palembang, 12 Februari 2024
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.



Fredy Ferdian Isnartanto,
Letnan Kolonel Chk



LAMPIRAN



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579
Website : dilmil.palembang.go.id
Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

CAPAIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	96%	100%	104,2%
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	80,4%	107,2%
		3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%	100%	100,4%
		4. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	91%	92,5%	100,5%
b.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
c.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Fredy Ferdian Isnartanto
Letnan Kolonel Chk

**DAFTAR PEGAWAI YANG MENGIKUTI DIKLAT
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
TAHUN 2023**

No	Nama Pangkat/Gol/NRP/NIP	Kegiatan	Penyelenggara
JANUARI 2023			
1.	- Niarti, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 522941 - Zulkopli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060002741279 - Supriyadi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950303390275	Kegiatan Refleksi Kinerja Tahun 2022 serta Pembinaan dan Pengarahan Rencana Kerja Tahun 2023.	Dilmiltama
2	- Sorna Nauli Nasution, S.H. Penata Muda NIP 198606032011012023 - Srilanjari, A.Md. Pengatur NIP 199309082020122012	Kegiatan Sosialisasi Pembuatan Bukti Pemotongan 1721 A2 dan Validasi NIK Wajib Pajak Instansi Pemerintah.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.
FEBRUARI 2023			
1	Sudiyo, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 292006651169	Pemanggilan Peserta Profile Assesment Uji Kelayakan / Fit and Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Militer Tipe A dan Kepala Pengadilan Militer Tipe B TA 2023.	Dirjen Badilmiltun MARI
2	Zulkopli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11970027910670	Bimtek Panitera / Panitera Pengganti TA 2023.	Dirjen Badilmiltun MARI
3	- Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11970027910670 - Sudiyo, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 292006651169	Bimtek Hakim Militer Penyelesaian Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer TA 2023.	Dirjen Badilmiltun MARI
4	Niarti, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 522941	Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2022.	MARI
5	Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 607952	Pelatihan Teknis Yudisial Perkara Teroris Bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer Seluruh Indonesia.	Pusdiklat Teknis Peradilan

6	Sudiyo, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 292006651169	Kegiatan Pelatihan Teknis Yudisial Penistean Agama bagi Hakim Militer seluruh Indonesia	Balitbang Kumdil MARI, Pusdiklat MARI
MARET 2023 - NIHIL			
APRIL 2023 - NIHIL			
MEI 2023			
1	Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 607952	Pelatihan Peradilan yang Adil (<i>Fair Trial</i>) Bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum,	Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
2	Gunadi, S.H. Lettu Chk NRP 21010051510681	Fokus Group Discussion (FGD) Wilayah Hukum Jawa Timur	Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
JUNI 2023			
1	Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010047011279	Kegiatan Pengembang / Penyempurnaan RBPP dan RBPMP Pelatihan Teknis Yudisial Peradilan Militer.	Balitbang Diklat Kumdil MARI
2	- Zulkopli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 110600027471279 - Hari Wibowo, S.H. Serda NRP 21050308900785	Bimtek Kepaniteraan Dilmitama TA 2023 dengan Tema Meningkatkan Kompetensi SDM Kepaniteraan Peradilan Militer di Bidang Administrasi dan Persidangan Perkara secara Elektronik guna percepatan penyelesaian perkara	Dilmitama
3	Alexander S. Sihotang, S.E. Penata Muda NIP 199209072020121004	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan Secara <i>Blended Learning</i> Gelombang 3 Angkatan X Tahun 2023	Balitbang Diklat Kumdil MARI
JULI 2023			
1	Alexander S. Sihotang, S.E. Penata Muda NIP 199209072020121004	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan Secara <i>Blended Learning</i> Gelombang 3 Angkatan X Tahun	Balitbang Diklat Kumdil MARI

2	Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010047011279	2023 On Campus (Tatap Muka) Kegiatan Pembinaan dan Rapat Koordinasi Pembentukan Dilmilti dan Dilmilt Baru di Lingkungan Peradilan Militer.	Dilmiltama
3	Devi Wahyuni, S.H., M.H. Penata NIP 198509142009042006	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan Tahun 2023.	Badan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Regional VII Palembang
AGUSTUS 2023			
1	Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 2196034680974	Kegiatan Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Militer Seluruh Indonesia : - Pembelajaran Mandiri (E-Learning) - Pembelajaran Tatap Muka Klasikal	Balibang Diklat Kumdil MARI
2	- Zulkopli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 110600027471279 - Gunadi, S.H. Lettu Chk NRP 21010051510681	Kegiatan BinteK Panitera / Panitera Pengganti Peradilan Militer TA 2023 secara Daring.	Dirbinganis dan Administrasi Peradilan Militer Dirjen Badilmiltun MARI
3	- Supriyadi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950303390275 - Devi Wahyuni, S.H., M.H. Penata NIP 198509142009042006	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Biro Kepewaiian	Biro Kepegawaian MARI
4	Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel NRP 11010047011279	Kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dalam rangka melaksanakan penyusunan Naskah Urgensi T.A 2023 dengan judul "Penerapan Restorative Justice dalam Penjatuhan Pidana terhadap TNI yang melakukan Tindak Pidana KDRT .	Balibang Diklat Kumdil MARI
3	Medi Darmawansyah, S.H., M.H. Penata Tk I NIP 198605312006041003	Kegiatan Sosialisasi Penilaian Kinerja JF APK APBN dan JF PK APBN Berdasarkan Permen PAN RB No. 1 Tahun 2023 Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023	Dirjen Perbendaharaan Negara Tipe A1 Palembang
4	Scrna Nauli Nasution, S.H. Penata Tk I NIP 1988606032011012023	Kegiatan Rapat Koordinasi Bendahara Pengeluaran <i>Bacth</i> Ke IV.	

			Kabiro Keuangan MARI
SEPTEMBER 2023			
1	<ul style="list-style-type: none"> - Endah Wulandari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 - Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786 	Kegiatan BinteK Kompetensi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer dengan Tema Proses Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer, dilaksanakan secara Daring.	Dirbinganis dan Administrasi Peradilan Militer Dirjen Badilmiltun MARI
2	Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel NRP 11010047011279	Kegiatan Konsinyering Hasil penyusunan Naskah Urgensi "Penerapan Restorative Justice dalam Penjatuhan Pidana terha-dap TNI yang melakukan Tindak Pidana KDRT".	Balitbang Diklat Kumdil MARI
3	<ul style="list-style-type: none"> - M. Maniar Marpaung Penata Muda Tk I NIP 1968020881991032001 - Hari Wibowo, S.H. Serma NRP 21050308900785 - Rosita, S.H. Serma (K) NRP 21050319220386 - Berliana, A.Md., A.B. Pengatur NIP 199706132022032020 - Febriadi. PPNPN - Sugeng Riyadi, S.E. PPNPN - Enno Violita., S.H. PPNPN 	Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) T.A 2023 secara Daring	Dirbinganis dan Administrasi Peradilan Militer Dirjen Badilmiltun MARI
4	<ul style="list-style-type: none"> - Medi Darmawansyah, S.H., M.H. Penata Tk I NIP 198605312006041003 - M. Nasir, S.H. Penata NIP 198205132006041004 	Kegiatan BinteK Aplikasi SAKTI Full Modul.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Palembang
5	Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel NRP 11010047011279	Kegiatan Konsinyering Finalisasi Penyusunan Naskah Urgensi "Penerapan Restorative Justice dalam Penjatuhan Pidana	Balitbang Diklat Kumdil MARI

6	Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077	terha-dap TNI yang melakukan Tindak Pidana KDRT: Kegiatan Bimtek Kepaniteraan T.A 2023 dengan Tema Meningkatkan Kompetensi Panitera dan Panitera Pengganti di dalam Peercepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dengan Memegang Teguh Kode Etik.	Dilmiltama
7	Supriyadi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950303390275	Kegiatan Rapat Koordinasi Kesekretariatan antara Dirjen Badilmiltun MARI dengan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.	Dirjen Badilmiltun MARI
8	Oktoriadi, S.H., M.H. Letda Chk NRP 21050075671085	Kegiatan Bimtek Kepaniteraan Dilmiltama T.A 2023 dengan Tema Meningkatkan Kompetensi Panitera dan Panitera Pengganti di dalam Peercepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dengan Memegang Teguh Kode Etik.	Dilmiltama

OKTOBER 2023

1	- Devi Wahyuni, S.H., M.H. Penata NIP 198509142009042006 - Febriansyah, S.H. Penata NIP 198002232006041001	Kegiatan Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen.	Badan Pendidik dan Latihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
2	- Mona Anggreyri, S.I.P. Penata Muda Tk I NIP 199405162019032009 - Sorna Nauli Nasution, S.H. Penata Muda Tk I NIP 1988606032011012023 - Alexander S. Sihotang, S.E. Penata Muda NIP 199209072020121004	Kegiatan Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Badan Pendidik dan Latihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
3	Zulkopli, S.H., M.H.	Kegiatan Peningkatan	Dirjen

	Mayor Chk NRP 110600027471279	Kompetensi Sumber Daya Manusia (Tenaga Teknis Kepaniteraan) di Lingkungan Peradilan Militer T.A 2023	Badilmiltun MARI
4	Mona Anggreyni, S.I.P. Penata Muda Tk. I NIP199405162019032009	Kegiatan Pembentukan Organisasi Profesi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur.	Ka BUA MARI
NOVEMBER 2023			
1	- Syawaluddinsyah, S.H., M.H. Letnan Kolonel NRP 11010002461171 - J.M. Siahaan, S.H., M.H. Letnan Kolonel NRP 29200877881171	Kegiatan Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilihan Umum Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Militer Seluruh Indonesia dengan metode blended learning (Daring dan Tatap Muka).	Balitbang Diklat Kumdil MARI.
2	- Agustina Yanti, S.H. Penata TK I NIP 196798151989032002 - Medi Darmawansyah, S.H., M.H. Penata Tk I NIP 198605312006041003 - Febriansyah, S.H. Penata NIP 198002232006041001 - Gunadi, S.H. Lettu Chk NRP 21010051510681	Kegiatan Bimbingan Teknis Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi Medan dengan tema 'IKPA Sebagai Alat Ukur untuk Mendukung Profesionalisme dan Akuntabilitas (secara Daring)	Dilmilti I Medan
DESEMBER - NIHL			



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NOMOR 52 /KPM.W1-Mil04/SK.KP3.4.1/1/2024

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; dan
- b. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 - 2024 maka Pengadilan Militer I-04 Palembang perlu menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI; dan
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/Sek/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang tanggal, 13 September 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MARI dan Pengadilan Militer I-04 Palembang agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang.
Pada tanggal 0 Januari 2024

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,



FREDY FERDIAN ISNARTANTO
LETNAN KOLONEL CHK

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ka BUA Mahkamah Agung RI;
2. Dirjen Badilmiltun MARI;
3. Kadilmiltama; dan
4. Kadilmilti I Medan.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Pengsitan Militer I-04 Palembang
 Nomor : 52 / KPM.W1-M304/SK.KP3-4.1/1/2024
 Tanggal : 8 Januari 2024

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p style="text-align: center;">PENJELASAN</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkar a di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah waktu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA nomor 2 Tahun 2014 pada Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara – Pidana/Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas. $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan</p>	<p>Catatan : Indek Kepuasan Stakeholder</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM index harus > 80. • Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odnil, PM (Penyidik Pom) dan Ankuum sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Papera: Perwira Penyerah Perkara. • Odnil : Oditur Militer. • PM : Polisi Militer. • Ankuum : Atasan Yang Berhak Menghukum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan direvisikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. • Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (direvisikan). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	---	--	---	----------	-------------------------------------

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,



FREDY FERDIAN ISNARTANTO
LETNAN KOLONEL CHK

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Militer I-04 Palembang
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang yang Agung
 Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas Pengadilan Militer I-04 Palembang
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	90%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92%	94%	96%	98%	100%
2.	Tercapainya pengelolaan perkara efektifitas penyelesaian	Miniasi yang tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	89%	90%	91%	92%	92%
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%



PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

REVIU

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

Pengadilan Militer I-04 Palembang



Jl. H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) - 5620579
Email : PALEMBANG.DILMILI.04@gmail.com
Website : www.dilmil.palembang.go.id



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 15 November 2023

Pihak Kedua

Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan



Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Pihak Pertama

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

**LAMPIRAN REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%
		d. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%

Kegiatan

Anggaran

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Rp4.195.250.000,00
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA	Rp579.030.000,00
3. Meningkatkan Manajemen Peradilan Militer	Rp171.680.000,00
	<u>Rp4.945.960.000,00</u>

Palembang, 15 November 2023

Pihak-Kedua

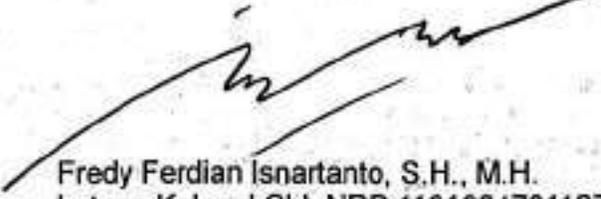
Pihak Pertama

Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang,



Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI



Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279



Pengadilan Militer I-04 Palembang

AWAL



**PERJANJIAN KINERJA (PK)
TAHUN 2023**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Niarti, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Selaku atasan langsung dari pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Pihak Pertama,
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



MATERAI
TEMPEL

171207240

Niarti, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522941

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

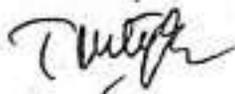
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %
		b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	96 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	96 %
		d. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	91 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Rp. 4.462.834.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA	Rp. 379.030.000,-
3. Meningkatkan Manajemen Peradilan Militer	Rp. 171.680.000,-
	<u>Rp. 5.013.544.000,-</u>

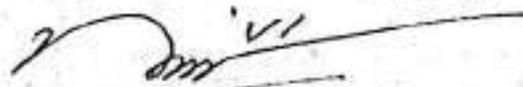
Palembang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Pihak Pertama,
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI



Niarti, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522941

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Letnan Kolonel Chk/11010047011279
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Laksamana Pertama TNI
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Selaku atasan langsung dari pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Pihak Pertama,
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi. d. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan. 	<p>100%</p> <p>75%</p> <p>96%</p> <p>92%</p>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. b. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. c. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan. 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>99%</p>

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Rp. 4.219.945.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp. 172.680.000,-
	Rp. 4.392.625.000,-

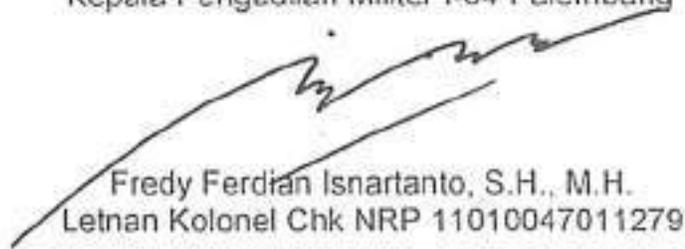
Palembang, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan



Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Pihak Pertama,
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NOMOR 87 /KPM.W1-Mil04/SK.KP3.4.3/1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2024 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama; dan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjip) Tahun 2024 Pengadilan Militer I-04 Palembang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang.

Pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

FREDY FERDIAN ISNARTANTO
LETNAN KOLONEL CHK

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang
Nomor : 01 / KPM.W1-Mil04/SK.KP3.4.3/1/2024
Tanggal : 8 Januari 2024

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Letkol Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H
2	Koordinasi Validasi Data	Letkol Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
3	Ketua	Mayor Chk Zulkopli, S.H., M.H.
4	Sekretaris	Mayor Chk Supriyadi, S.H., M.H.
5	Anggota	1. Lettu Chk Tobri Antony, S.H. 2. Lettu Chk Gunadi, S.H. 3. ASN Agustina Yanti, S.H. 4. ASN Febriansyah, S.H. 5. ASN Devi Wayhuni, S.H., M.H. 6. ASN Alexander Sepriyanto Sihotang, S.E 7. PPNPN Sugeng Riyadi, S.E
6	Tim Reviu Laporan Kinerja	1. Letkol Chk J.M. Siahaan, S.H., M.H. 2. Letkol Chk Sudiyo, S.H., M.H. 3. Mayor Chk (K) Endah Wulandari, S.H., M.H. 4. Kapten Chk Sugiarto, S.H.

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,


FREDY FERDIAN ISNARTANTO
LETNAN KOLONEL CHK

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG
NOMOR : 077/KPM.W1-MI04/SK.KP3.4.3/1/2024
TANGGAL : 07 JANUARI 2024

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Militer I-04 Palembang
2	Koordinasi Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit eselon I
6	Tim Reviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,



FREDY FERDIAN ISNARTANTO
LETNAN KOLONEL CHK



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT BADAN JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permana Indah Jakabaring Palembang 30257

Telp/Fax. (0711) 5620579

Website : dilmil.palembang.go.id

Email : palembang.dilmil04@gmail.com

**REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA
DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2023
PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

NO	AKUN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	2.792.986.000	2.543.086.768	91,05	249.899.232	8,95
2	Belanja Barang	1.437.024.000	1.427.817.756	99,36	9.206.244	0,64
3	Belanja Modal	579.030.000	577.205.000	99,68	1.825.000	0,32
	Jumlah	4.809.040.000	4.548.109.524	94,57	260.930.476	5,43

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran,

Supriyadi
Mayor Chk

Palembang, 3 Januari 2024

Kasubbag Umum dan keuangan,

Agustina Yanti
Penata Tingkat I



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT BADAN JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang 30257

Telp/Fax. (071 1) 562.0579

Website : dilmil.palembang.go.id

Email : palembang.dilmil04@gmail.com

**REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA
DIPA (05) DITJEN BADILMILTUN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2023
PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

NO	AKUN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	171.680.000	168.409.750	98,10	3.270.250	1,90
	Jumlah	171.680.000	168.409.750	98,10	3.270.250	1,90

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran,



Supriyadi
Mayor Chk

Palembang, 3 Januari 2024

Kasubbag Umum dan keuangan,



Agustina Yanti
Penata Tingkat I



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579
Website : dilmil.palembang.go.id
Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

Nomor : 31 /SEKPM W.1Mil04/RA.1.8/XII/2023 Palembang, 12 Desember 2023
Lampiran : -
Klasifikasi : Biasa
Perihal : Undangan Rapat Penyusunan SAKIP dan LKjIP

Kepada
Yth. Anggota Dilmil I-04 Palembang
di
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan diadakannya Rapat Penyusunan SAKIP dan LKjIP, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam acara tersebut yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
Jam : 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Teleconference Dilmil I-04 Palembang

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang
Waka
U.b.
Sekretaris,



Supriyadi
Mayor Chk



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579
Website : dilmil.palembang.go.id
Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

NOTULEN
RAPAT PENYUSUNAN SAKIP 2024
DAN PENYUSUNAN LKJIP TAHUN 2023
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Tempat : Teleconference Dilmil I-04 Palembang
Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai
Peserta : Terlampir dalam Absen

No	Pembicara	Materi/ Pengarahan/ Pertanyaan	Uraian/Tanggapan
1.	Kadilmil	Pembukaan	<p>Kadilmil mengucapkan salam kepada peserta rapat, dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta pada acara rapat.</p> <p>Kadilmil menyampaikan perihal penyampaian dan pembuatan Dokumen SAKIP yang harus disampaikan pada Februari 2024 ini. Penyampaian ini didasarkan pada surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP pada tanggal 19 Desember 2023 serta Surat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 76/KPMT.W1-Mil/RA.1.6/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal penyampaian Dokumen SAKIP paling lambat dikirim ke Dilmil I Medan yang harus diterima paling lambat tanggal 23 Februari 2024 serta melengkapi evidence melalui link LKE AKIP Tahun 2023.</p> <p>Kadilmil memberikan kesempatan kepada Sekretaris untuk menyampaikan informasi dan materi dalam penyusunan SAKIP tahun 2024 dan penyusunan LKJIP Tahun 2023.</p>

2.	Sekretaris	Penyampaian Materi	<p>Sekretaris menyampaikan bahwa SAKIP yang akan disusun ini terdiri dari dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dokumen Rencana Aksi Kinerja tahun 2024, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.</p> <p>Sekretaris meminta saran dan dokumen-dokumen tersebut kepada seluruh peserta rapat.</p>
3.	Wakadilmil	Himbauan	<p>Wakadilmil mengingatkan agar selalu memperhatikan tanda baca dalam penyusunan terlebih untuk tahun yang sesuai walaupun dalam pelaksanaannya konsep tersebut sudah ada sebelumnya.</p> <p>Data-data dalam penyusunan laporan ini harus di <i>compare</i>/disamakan dengan keadaan riil pada saat ini dan harus dilihat juga capaian dari setiap indikator-indikator penilaiannya, supaya setiap laporan memiliki capaian indikator yang sama dan tidak berbeda.</p> <p>Untuk penyusunan IKU, harus mengikuti IKU yang terbaru jika tidak ada perubahan maka mengikuti IKU yang sudah ada sebelumnya</p> <p>Untuk PKT sudah dilaksanakan pada awal tahun ini maka dari itu bisa langsung dimasukkan kedalam lampiran pada Renstra, RAK, dan bisa juga untuk RKT tahun 2025 mengingat belum ada perubahan dari IKU yang ada sebelumnya</p>
4.	Panitera	Penyampaian informasi	<p>Dari unsur kepaniteraan sudah mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan saat ini. Laporan-laporan tersebut sudah disiapkan sebagaimana biasanya dibuat untuk laporan bulanan, triwulan, semester, ataupun tahunan.</p> <p>Laporan-laporan bulanan, triwulan, semester, ataupun tahunan yang telah dibuat dapat diminta <i>soft copy</i>-nya dan sudah disiapkan sesuai dengan bahan yang akan dipakai dalam isi laporan-laporan tersebut.</p>
5.	Sekretaris	Penyampaian informasi	<p>Isi dari laporan-laporan tersebut juga berkenaan dengan kesekretariatan seperti bagian keuangan tentang capaian realisasi anggaran selama tahun 2023, bagian kepegawaian seperti jumlah anggota yang ada dan beberapa proses mutasi selama tahun 2023 boleh dimasukkan dalam laporan tersebut.</p>

6.	Kasubbag PTIP	Penyampaian Informasi	Isi dari laporan seperti LKJiP secara garis besar mengikuti isi dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2023 yang juga menjadi patokan dalam pembuatan Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan melihat perbandingan capaian kinerja dengan target capaian yang ada dalam Renstra 2020-2024.
7.	Kasubbag PTIP	Penyampaian Informasi	<p>Beberapa indikator tersebut meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 3. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 4. Indeks Persepsi <i>Stakeholder</i> yang puas terhadap layanan Peradilan 5. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu. 6. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. <p>Kemudian dalam proses penyusunan ini juga dibutuhkan analisis tentang pencapaian yang dari setiap indikator-indikator tersebut.</p>
8.	Panitera	Penyampaian Informasi	<p>Dari ke 6 indikator tersebut terdapat 5 indikator yang berkenaan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara. Dalam hal ini kepaniteraan akan memberikan informasi sebagaimana yang ada pada kondisi saat ini sesuai dengan indikator-indikator tersebut serta capaian dari setiap indikator</p> <p>Sedangkan untuk pelaksanaan Indikator Index Persepsi Kepuasan Masyarakat dapat dilakukan informasi pelaksanaannya oleh bagian kesekretariatan.</p>
9.	Sekretaris	Penyampaian informasi	<p>Terkait Indikator Index Persepsi kepuasan Masyarakat yang puas terhadap pelayanan pengadilan telah dilakukan selama ini dengan baik dengan jumlah minimal jumlah survei sebanyak 30 orang, dan dalam pelaksanaan survei petugas tidak diperbolehkan memberikan arahan nilai kecuali arahan cara pengisian.</p> <p>Hasil survei tersebut di lakukan rekapitulasi selama 3 bulan sekali/pertriwulan dan pengisian dalam LKJiP pada indikator IKM adalah hasil rekapitulasi dari setahun pada tahun 2023.</p>

10.	Kadilmil	Himbauan	<p>Kadilmil I-04 Palembang menghimbau untuk selalu semangat dan bekerjasama dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Renstra dalam lima tahun ke depan.</p> <p>Kadilmil mengingatkan agar dalam proses penyusunan diperhatikan pada pedoman penyusunan laporan sesuai dengan peraturan/ surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.</p>
11.	Kadilmil	Penutup	<p>Kadilmil menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang atas peran serta dan partisipasi selama ini "Bersama Kito Pacak"</p>

Sekretaris



Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21950303390275

Palembang, 13 Desember 2023

Notulen



Mona Anggreyni, S.I.P.
NIP 199405162019032009

Mengetahui,
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP
11010047011279



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang

Telp/Fax. (0711) 5620579

Website : dilmil.palembang.go.id

Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

DOKUMENTASI RAPAT PENYUSUNAN SAKIP DAN LKJIP





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek OPI Jakabaring Palembang 30257 Telp/Fax. (0711) - 5620579
Email : palembang.dilmil04@gmail.com Website : www.dilmil-palembang.go.id

**DAFTAR HADIR
RAPAT PENYUSUNAN SAKIP DAN LKJIP
PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Tanggal: **13** Desember 2023

No	Nama/Pangkat/Korps/NRP/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010047011279	Kadilmil	
2.	Syawaluddinsyah, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010002461171	Wakadilmil	
3.	Sudiyo, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 2920066651169	Pokkimmil	
4.	Zulkopli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060002741279	Panitera	
5.	Supriyadi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950303390275	Sekretaris	
6.	Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786	Pokkimmil	
7.	Agustina Yanti, S.H. Penata Tk-I NIP 196708151989032002	Kasubbag Umum dan Keuangan	
8.	Febriansyah, S.H. Penata NIP 198002232006041001	Kasubbag PTIP	
9.	Devi Wahyuni, S.H., M.H. Penata NIP 198509142009042006	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
10.	Muhammad Nasir, S.H. Penata NIP 198205132006041004	JF. APK APBN Ahli Pertama	
11.	Sorna Nauli Nasution, S.H. Penata Muda Tk. I NRP 198606032011012023	JF. Pranata Keuangan APBN Lanjutan	
12.	Alexander Sepriyanto Sihotang, S.E. Penata Muda NIP 199209072020121004	Staf	

Sekretaris

Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21950303390275

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

No	Pernyataan	Check List	
1.	Format	1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	√
		2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan kinerja	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan kinerja telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam Laporan kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam Laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		2. Tujuan/sasaran dalam Laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam Laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam Laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan Indikator Kinerja telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan Indikator Kinerja telah SMART	√

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
DILMIL I-04 PALEMBANG**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Urusan Administrasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palembang, 7 Februari 2024

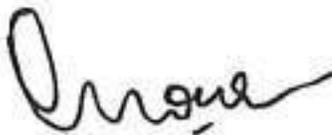
Pereviu I


J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920087781171

Pereviu II

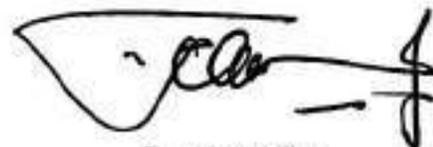

Sudiyo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk 2920066651169

Pereviu III



Endah Wulandari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) 11070056110484

Pereviu IV



Sugiarto, S.H.
Kapten Chk 11120031710786



**MAKHAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang

Telp/Fax: (0711) 5620579

Website : dimil.palembang.go.id

Email : Palembang.dimil04@gmail.com

DOKUMENTASI RAPAT REVIU LKjIP TAHUN 2023





Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI)

Jakabaring Palembang 30257

Telp/Fax. (0711)- 5620579

Email : palembang.dilmil04@gmail.com

website : dilmil-palembang.go.id/